



Katalog BPS : 4102004.3674
ISSN : 2089-4619

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015





Katalog BPS : 4102004.3674
ISSN : 2089-4619

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015



Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA TANGERANG SELATAN

2014

ISSN : 2089-4619

Katalog BPS : 4102004.3674

Ukuran Buku : 25 cm x 17,6 cm

Jumlah Halaman : x + 76 Halaman / *pages*

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan

Gambar:

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan

Dicetak oleh:

"Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya"

Kata Pengantar Kepala BPS Kota Tangerang Selatan

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas terbitnya publikasi "**Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan 2014**". Publikasi ini merupakan publikasi kedua yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan dan direncanakan akan diterbitkan secara rutin tiap tahunnya. Data yang digunakan bersumber dari BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sebagian besar data indikator kesejahteraan rakyat bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) keadaan Juli 2013, khusus untuk data ketenagakerjaan bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) keadaan Agustus 2014.

Publikasi ini menyajikan aspek-aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf kesejahteraan dan pola konsumsi, perumahan, serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Selain itu juga ditampilkan angka Indikator Pembangunan Manusia berikut komponen penyusunnya.

Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini. Kepada para pengguna diharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan publikasi ini pada masa yang akan datang.

Setu, 31 Desember 2015

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Tangerang Selatan



Faizin, S.Si,ME

NIP. 19660510 1991 01 1 001

<http://tangselkota.bps.go.id>

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar Kepala BPS Kota Tangerang Selatan.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
I. Kependudukan.....	1
1.1. Jumlah Penduduk dan Sex Ratio.....	4
1.2. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk.....	5
1.3. Komposisi penduduk.....	8
II. Kesehatan dan Gizi.....	15
2.1. Angka Keluhan, Angka Kesakitan dan Lamanya Sakit.....	17
2.2. Balita yang diberi ASI dan Imunisasi.....	19
2.3. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan.....	21
III. Pendidikan.....	30
3.1. Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS).....	32
3.2. Tingkat Pendidikan yang ditamatkan dan Partisipasi Sekolah.....	34
IV. Ketenagakerjaan.....	45
4.1. Indikator Ketenagakerjaan.....	48
4.2. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.....	51
4.3. Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan dan Jam Kerja.....	54
V. Kemiskinan dan Pola Konsumsi	57
VI. Perumahan dan Lingkungan.....	73
VII. Indeks Pembangunan Manusia.....	81
7.1 Indikator Kesehatan.....	86
7.2 Indikator Pengetahuan.....	86
7.2.1. Angka Melek Huruf.....	87

7.2.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / Mean Years of Schooling.....	88
7.2.3. Indeks Pengetahuan (Indeks AMH + Indeks RLS).....	88
7.3. Indikator Ekonomi.....	89
7.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	91

<http://tangselkota.bps.go.id>

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kota Tangerang Selatan Tahun 2014	3
Tabel 1.2	Kepadatan Penduduk Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2014	7
Tabel 1.3	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2014	9
Tabel 2.1	Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 - 2014	18
Tabel 2.2	Persentase Balita yang Pernah diberi ASI dan Imunisasi di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 - 2014	19
Tabel 2.3	Persentase penolong Kelahiran di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 - 2014	23
Tabel 2.4	Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Obat yang Digunakan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 - 2014	24
Tabel 2.5	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 - 2014	26

- Tabel 3.1 Angka Melek Huruf (Latin) dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 - 2014
.....
33
- Tabel 3.2 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 - 2014
.....
35
- Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013- 2014
.....
37
- Tabel 3.4 APM dan APK Kota Tangerang Selatan menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014
.....
39
- Tabel 4.1 Indikator Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014
.....
49
- Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2014
.....
52
- Tabel 4.3 Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2014 (persen)
.....
53
- Tabel 4.4 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014
.....
55
- Tabel 5.1 Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2014

Daftar Tabel

.....	59
Tabel 5.2 Indikator Kemiskinan Kabupaten Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2014
.....	60
Tabel 5.3 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Perbulan Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2013-2014
.....	67
Tabel 5.4 Persentase Penduduk Menurut Rata-rata Pengeluaran Perkapita Perbulan Kabupaten Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2014
.....	69
Tabel 6.1 Indikator Fasilitas Perumahan Kota Tangerang Selatan, Tahun 2013 - 2014 (Persen)
.....	77
Tabel 7.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM
.....	84
Tabel 7.2 Indeks Komponen Penyusun IPM Kota Tangerang Selatan Tahun 2013-2014
.....	90
Tabel 7.3 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Komponen IPM dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten 2013-2014
.....	92
Tabel 7.4 Peringkat IPM Secara Nasional Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten 2013-2014
.....	94

<http://tangselkota.bps.go.id>

Daftar Gambar

Halaman

- Gambar 1.1. Penduduk Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 2014
.....
11
- Gambar 1.2. Piramida Penduduk Kota Tangerang Selatan 2014
.....
12
- Gambar 1.3. Persentase Penolong Kelahiran di Kota Tangerang Selatan Tahun 2014
.....
22

<http://tangselkota.bps.go.id>

<http://tangselkota.bps.go.id>

BAB I

KEPENDUDUKAN

<http://tangselkota.bps.go.id>

Penduduk merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan, karena permasalahan kependudukan tidak hanya menyangkut kelahiran, kematian dan migrasi, tetapi juga menyangkut masalah sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan yang sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, data kependudukan yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan dalam upaya penyelesaian masalah tersebut.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio*
di KotaTangerang Selatan Tahun 2014

No	Kecamatan	Penduduk		Total	<i>Sex Ratio</i>
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Setu	39.814	38.067	77.881	104,59
2	Serpong	81.291	82.624	163.915	98,39
3	Pamulang	163.531	160.426	323.957	101,94
4	Ciputat	111.535	107.849	219.384	103,42
5	Ciputat Timur	99.683	98.277	197.960	101, 43
6	Pondok Aren	179.064	174.840	353.904	102,42
7	Serpong Utara	77.682	78.316	155.998	99,19
Tangerang Selatan		752.600	740.399	1.492.999	101,65

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk 2014

Dalam proses pembangunan, penduduk disamping sebagai pelaksana pembangunan juga merupakan sasaran akhir dari semua target program pembangunan, seperti peningkatan kesejahteraan, kesehatan, keamanan, kualitas sumber daya manusia dan sebagainya. Oleh sebab itu, pembangunan bidang kependudukan perlu dikelola dengan baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Karakteristik penduduk menjadi acuan bagi

pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan. Begitu juga untuk bahan evaluasi, data mengenai kependudukan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

1.1. Jumlah Penduduk dan Sex Ratio

Pada Tahun 2014, Penduduk Kota Tangerang Selatan berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2013 berjumlah 1.492.999 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 752.600 jiwa dan perempuan 740.399 jiwa. Bila dilihat penyebarannya pada tiap kecamatan, maka Kecamatan Pondok Aren merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 353.904 jiwa, diikuti Kecamatan Pamulang sebanyak 323.957 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Setu, yaitu sebanyak 77.881 jiwa.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, maka jumlah penduduk laki-laki di Kota Tangerang Selatan lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa Angka *sex ratio* penduduk Tangerang Selatan pada tahun 2014 sebesar 101,65. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap 100 orang penduduk perempuan di Tangerang Selatan terdapat kurang lebih 102 orang penduduk laki-laki. Bila diteliti lebih jauh apa yang menyebabkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan, ada beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan kondisi ini terjadi adalah jumlah kelahiran laki-laki lebih besar dari perempuan, penduduk perempuan yang sekolah dan bekerja di luar Tangerang Selatan lebih banyak dari penduduk laki-laki, tingkat kesehatan penduduk perempuan lebih rendah dari penduduk laki-laki dan tingkat migrasi keluar penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki. Mungkin juga para pendatang dari luar daerah Kota Tangerang Selatan lebih

banyak laki-laki dibanding perempuan. Untuk lebih akuratnya diperlukan penelitian yang lebih mendalam.

1.2. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota dari 8 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang dan diresmikan sebagai daerah otonom pada tanggal 28 Oktober 2008 dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 51 tahun 2008. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah strategis karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, berjarak ± 20 kilometer ke ibukota negara dan ± 20 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Batas-batas wilayah administrasi Kota Tangerang Selatan menurut Undang-undang 51 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pinang, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

Secara administratif Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Setu, Serpong, Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, Pondok Aren dan Serpong Utara. Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah 147,19 kilometer persegi. Secara umum Kota Tangerang Selatan

merupakan dataran rendah dengan letak ketinggian di atas permukaan laut lebih dari 25 meter.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah beriklim tropis, temperatur rata-rata berkisar antara 24,5–33,0°C dengan temperatur terendah berkisar 24,0°C. Rata-rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 77 persen dan 54 persen. Rata-rata kecepatan angin dalam setahun adalah 2,2 meter perdetik dengan kecepatan maksimum 9 meter perdetik.

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yang secara geografis terletak pada koordinat :

6° 39' 00" - 6° 47' 00" Lintang Selatan

106° 14' 00" - 106° ' 22" Bujur Timur

Dengan luas wilayah sebesar 147,19 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.492.999 jiwa, maka pada tahun 2014 setiap Km² wilayah di Kota Tangerang Selatan rata-rata ditempati oleh 10.143 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah yang padat penduduknya. Sebagai wilayah perkotaan dengan letak yang cukup strategis, ditambah tersedianya berbagai fasilitas umum baik di bidang transportasi, kesehatan, pendidikan, perdagangan dan jasa menjadikan Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah tujuan urbanisasi penduduk dari wilayah lain.

Bila dilihat menurut luas wilayah maka Kecamatan Pondok Aren merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya, yaitu 29,88 Km². Berikutnya diikuti oleh Kecamatan Pamulang dan Kecamatan Serpong dengan luas wilayah masing-masing sebesar 26,82 Km² dan 24,04 Km². Sedangkan dua kecamatan yang paling kecil luasnya adalah Kecamatan Setu dan Kecamatan Ciputat Timur, masing-masing sebesar 14,80 Km² dan 15,43

Km². Menurut asal terbentuknya Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Setu merupakan Kecamatan pecahan Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Sedangkan Kecamatan Ciputat Timur merupakan Kecamatan bentukan baru pecahan dari Kecamatan Ciputat.

Tabel 1.2
Kepadatan Penduduk Kota Tangerang Selatan
Menurut Kecamatan Tahun 2014

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Setu	14,80	77.881	5.262
2	Serpong	24,04	163.915	6.818
3	Pamulang	26,82	323.957	12.079
4	Ciputat	18,38	219.384	11.936
5	Ciputat Timur	15,43	197.960	12.830
6	Pondok Aren	29,88	353.904	11.884
7	Serpong Utara	17,84	155.998	8.744
Tangerang Selatan		147,19	1492.999	10.143

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk 2014

Apabila dilihat dari kepadatan penduduknya, ada 4 Kecamatan yang penduduknya cukup padat, dimana tiap Km² dihuni sekitar 12 ribuan jiwa, yang terpadat ada di Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 12.830 jiwa/Km². Kemudian diikuti oleh Kecamatan Pamulang sebanyak 12.079 jiwa/Km², Kecamatan Ciputat sebanyak 11.936 jiwa/Km² dan Kecamatan Pondok Aren sebanyak 11.884 jiwa/Km². Keempat kecamatan tersebut merupakan wilayah yang letaknya berada di sekitar pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan Kecamatan yang kurang padat penduduknya adalah Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara dengan kepadatan penduduk masing-masing sebesar 5.262 jiwa/Km², 6.818 jiwa/Km² dan 8.744 jiwa/Km². Ketiga kecamatan ini terletak di bagian barat

Kota Tangerang Selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

1.3. Komposisi Penduduk

Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur kurang dari 20 tahun, penduduk menengah jika median umur 20–30 tahun, dan penduduk tua jika median lebih dari 30 tahun. Pada tahun 2014 median umur penduduk Kota Tangerang Selatan adalah 25,26 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk di Kota Tangerang Selatan termasuk kategori penduduk menengah.

Situasi kependudukan suatu wilayah selain digambarkan melalui kepadatan penduduk dan rasio jenis kelaminnya, juga dapat tercermin dari komposisi penduduk menurut kelompok umurnya. Menurut Tabel 1.3, di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 terdapat 380.284 jiwa atau 25,47 persen penduduk yang termasuk usia belum produktif secara ekonomi, yaitu penduduk berumur 0-14 tahun. Pada kelompok usia 0-14 tahun ini, penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,46. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk perempuan usia 0-14 tahun terdapat sekitar 104 penduduk laki-laki pada kelompok usia yang sama.

Sedangkan untuk penduduk kelompok umur produktif, yaitu penduduk berumur 15-64 tahun berjumlah 1.072.001 jiwa atau 71,80 persen, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,13. Pada kelompok umur penduduk yang dianggap tidak produktif lagi, yaitu penduduk berumur 65 tahun keatas terdapat sejumlah 40.714 jiwa atau 2,73 persen. Berbeda dengan kelompok umur 0-14 tahun dimana laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, untuk kelompok usia tua (65 tahun keatas), penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki dengan rasio jenis kelamin

sebesar 90,15 yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan usia tua terdapat sekitar 90 penduduk laki-laki untuk kelompok usia yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa angka harapan hidup penduduk perempuan untuk kelompok usia tua lebih tinggi dibanding laki-laki. Diduga karena peranan laki-laki sebagai penanggung jawab pencari nafkah dalam keluarga mungkin salah satu penyebabnya sehingga laki-laki mempunyai resiko kematian yang lebih tinggi daripada perempuan.

Tabel 1.3
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
di Kota Tangerang Selatan Tahun 2014

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 4	72.781	9,67	70.051	9,46	142.832	9,57
5 – 9	65.471	8,70	62.290	8,41	127.761	8,56
10 – 14	56.034	7,45	53.657	7,25	109.691	7,35
15 – 19	60.052	7,98	62.875	8,49	122.927	8,23
20 – 24	65.314	8,68	67.525	9,12	132.839	8,90
25 – 29	71.163	9,46	73.139	9,88	144.302	9,67
30 - 34	72.926	9,69	74.394	10,05	147.320	9,87
35 – 39	68.947	9,16	69.591	9,40	138.538	9,28
40 – 44	62.624	8,32	60.389	8,16	123.013	8,24
45 – 49	51.817	6,89	49.994	6,75	101.811	6,82
50 – 54	39.773	5,28	36.964	4,99	76.737	5,14
55 – 59	29.921	3,98	25.263	3,41	55.184	3,79
60 – 64	16.475	2,19	12.855	1,74	29.330	1,96
65 – 69	9.431	1,25	9.140	1,23	18.571	1,24
70 – 74	5.181	0,69	5.579	0,75	10.760	0,72
75 +	4.690	0,62	6.693	0,90	11.383	0,76
JUMLAH	752.600	100	740.399	100	1.492.999	100

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk 2014

Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti yang disajikan pada Tabel 1.3, dapat diturunkan indikator kependudukan terkait potensi ekonomi ketenagakerjaan, yaitu Angka Beban Tanggungan

(*Dependency Ratio*). Angka Beban Tanggungan merupakan perbandingan antara penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan usia tua (65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Besaran nilai indikator ini menunjukkan beban tanggungan ekonomi penduduk usia produktif. Semakin kecil Angka Beban Tanggungan dapat menunjukkan potensi ekonomi masyarakat yang semakin baik karena akan semakin sedikit beban yang ditanggung penduduk usia produktif. Sebaliknya, semakin besar Angka Beban Tanggungan dapat menghambat akselerasi pembangunan, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas SDM baik secara individu maupun kolektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi besarnya angka beban tanggungan adalah dengan menekan angka kelahiran (*fertilitas*) dan menghindari usia perkawinan muda.

Pada tahun 2014, Angka Beban Tanggungan di Kota Tangerang Selatan sebesar 39,27 persen. Dengan kata lain setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 39 orang penduduk usia tidak produktif. Bila dibandingkan dengan Angka Beban Tanggungan Provinsi Banten yaitu sebesar 44,84 persen, maka Angka Beban Tanggungan Kota Tangerang Selatan masih lebih baik karena beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif lebih sedikit. Namun hal ini tidak berarti bahkan bisa menjadi masalah apabila tidak dimanfaatkan. Dengan menyediakan lapangan kerja baru yang bisa menyerap tenaga kerja produktif sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

Dari Gambar 1.1 terlihat bahwa distribusi penduduk di Kota Tangerang Selatan bervariasi antar kecamatan. Jumlah penduduk terbesar Kota Tangerang Selatan terdapat di Kecamatan Pondok Aren, yaitu meliputi 23,70 persen dari total jumlah penduduk. Kemudian diikuti oleh Kecamatan

Pamulang sebesar 21,70 persen dan Kecamatan Ciputat sebesar 14,69 persen. Kecamatan Setu dan Kecamatan Serpong Utara merupakan kecamatan dengan jumlah proporsi penduduk paling sedikit yaitu masing-masing sebesar 5,22 persen dan 10,98 persen.

Gambar 1.1 Penduduk Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 2014

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat lima kecamatan dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Pengecualian untuk Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara. Pada Kecamatan Serpong, penduduk laki-laki berjumlah 81.291 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 82.624 jiwa, dengan angka rasio jenis kelamin sebesar 98,39. Artinya dari 100 penduduk perempuan ada sekitar 98 penduduk laki-laki. Sedangkan di Kecamatan Serpong Utara penduduk laki-laki berjumlah 77.682 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 78.316 dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,19 yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan di Kecamatan Serpong Utara ada sekitar sekitar 99 penduduk laki-laki.

Situasi penduduk menurut kelompok umur juga bisa digambarkan melalui Piramida penduduk. Piramida penduduk adalah dua buah diagram batang berbeda sisi dimana satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada satu sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia lima tahunan. Piramida penduduk menggambarkan perkembangan penduduk dalam kurun waktu tertentu. Negara atau daerah dengan angka kematian bayi yang rendah dan memiliki usia harapan hidup

tinggi, bentuk piramida penduduknya hampir menyerupai kotak, karena mayoritas penduduknya hidup hingga usia tua.

Sebaliknya yang memiliki angka kematian bayi tinggi dan usia harapan hidup rendah, piramida penduduknya berbentuk menyerupai genta (lebar di tengah), yang menggambarkan tingginya angka kematian bayi dan tingginya risiko kematian.

Bila dilihat dari bentuknya, piramida penduduk di Kota Tangerang Selatan sudah tidak berbentuk Limas tetapi sudah mengarah berbentuk seperti Granat/Stationer. Penduduk yang berada pada kelompok umur 5-9 tahun sudah mulai berkurang karena penurunan jumlah kelahiran selama 10 tahun yang lalu. Demikian juga untuk kelompok umur 10-14 tahun dan kelompok umur 15-19 tahun. Penduduk yang paling banyak ada di kelompok umur 30-34 tahun dan 25-29 tahun, yaitu masing-masing sebesar 9,87 persen dan 9,67 persen dari total penduduk. Sedangkan penduduk usia lanjut (kelompok umur 65 tahun keatas) berjumlah 40.714 jiwa atau hanya sebesar 2,73 persen. Hal ini menunjukkan tingginya persentase penduduk usia produktif di Kota Tangerang Selatan. Kelompok penduduk ini akan menjadi potensi ekonomi pada masa depan apabila dibekali dengan pengetahuan dan keahlian serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

BAB II

KESEHATAN DAN GIZI

<http://tangserkota.bps.go.id>

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui penyediaan berbagai fasilitas kesehatan umum seperti puskesmas/pustu, poskesdes, polindes, pondok bersalin desa, posyandu serta penyediaan fasilitas air bersih.

2.1. Angka Keluhan, Angka Kesakitan dan Lamanya Sakit

Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka keluhan dan angka kesakitan (*morbidity rate*). Tabel 2.1 menunjukkan besarnya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, mengalami keluhan dan mengganggu kegiatan sehari-hari(sakit) dan rata-rata lamanya sakit. Penduduk yang mengalami keluhan dan mengganggu kegiatan sehari-hari itulah yang dinamakan orang sakit yaitu mereka yang mempunyai keluhan kesehatan sampai mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah atau kegiatan sehari-hari.

Penduduk di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 yang mengalami keluhan kesehatan ada 15,78 persen serta yang mengalami keluhan yang mengakibatkan terganggunya aktifitas sehari-hari sebesar 6,26 persen dengan rata-rata lamanya sakit sekitar sekitar 4 hari dalam satu bulan. Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, penduduk yang mengalami keluhan, penduduk laki-laki lebih rendah dibanding penduduk perempuan, yaitu sebesar 14,46 persen untuk laki-laki dan 17,11 persen untuk perempuan. Demikian juga dengan angka kesakitan/morbiditas, penduduk laki-laki lebih rendah dibanding penduduk perempuan, yaitu sebesar 5,94

persen untuk laki-laki dan 6,58 persen untuk perempuan. Bila dilihat dari rata-rata lamanya sakit antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, tidak terlalu berarti perbedaannya yaitu sekitar 4,32 hari untuk laki-laki dan 4,67 hari untuk perempuan.

Tabel 2.1
Angka Keluhan, Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2013-2014

Indikator Kesehatan (1)	2013	2014		
	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	(2)	(3)	(4)	(5)
Angka Keluhan (%)	22,37	14,46	17,11	15,78
Angka Kesakitan (%)	8,53	5,94	6,58	6,26
Rata-rata Lamanya Sakit (hari)	6,32	4,32	4,67	4,50

Sumber : Susenas Tahun 2013-2014

Bila dilihat perkembangannya dengan tahun 2014 terlihat bahwa persentase penduduk Kota Tangerang Selatan yang mengalami keluhan kesehatan terjadi penurunan yang cukup berarti yaitu sebesar 6,57 persen. Tahun 2013 angka keluhan sebesar 22,37 persen dan tahun 2014 sebesar 15,78 persen. Demikian juga dengan angka kesakitan terjadi penurunan yang cukup berarti yaitu sebesar 2,27 persen, dimana tahun 2013 angka kesakitan sebesar 8,53 persen, pada tahun 2014 turun menjadi 6,26 persen. Demikian juga rata-rata lamanya sakit antara tahun 2013 dan tahun 2014 ada penurunan yang cukup berarti pula yaitu sebesar 1,82 persen. Tahun 2013 rata-rata lamanya sakit dalam satu bulan yaitu sekitar 6 hari sedangkan tahun 2014 rata-rata lamanya sakit turun menjadi sekitar 4 hari dalam satu bulan.

Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat kesehatan penduduk di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan dilihat dari menurunnya angka keluhan kesehatan maupun angka kesakitan demikian juga rata-rata lamanya sakit mengalami penurunan yaitu dari 6 hari menjadi 4 hari dalam sebulan. Ini menggambarkan bahwa dari segi kesehatan secara umum penduduk di Kota Tangerang Selatan tahun 2014 lebih baik dibanding tahun 2013.

2.2. Balita yang diberi ASI dan Imunisasi

Salah satu faktor penting untuk perkembangan anak adalah pemberian air susu ibu (ASI). ASI merupakan zat yang sempurna untuk pertumbuhan bayi dan dapat mempercepat perkembangan berat badan. Selain itu ASI juga mengandung zat penolak/pencegah penyakit serta dapat memberikan kepuasan dan mendekatkan hati ibu dan anak sebagai sarana menjalin hubungan kasih sayang. Sebagian besar ibu-ibu telah menyadari betapa pentingnya ASI bagi bayi, serta menyadari bahwa salah satu kodratnya sebagai seorang ibu adalah menyusui anaknya.

Tabel 2.2
Persentase Balita yang Pernah diberi ASI dan Imunisasi
di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 - 2014

Indikator Kesehatan	Tahun	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pernah diberi ASI (%)	96,39	94,89
Rata-rata lamanya diberi ASI (bulan)	13,75	13,76
Pernah diberi Imunisasi (%)	97,94	99,61

Sumber : Susenas Tahun 2013-2014

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sebagian besar balita di Kota Tangerang Selatan pernah diberi ASI, yaitu mencapai 94,89 persen, masih ada 5,11 persen balita yang tidak diberi ASI. Bila dibandingkan

dengan tahun 2013, maka tahun 2014 mengalami sedikit penurunan. Tahun 2013 persentase balita yang pernah diberi ASI sebesar 96,39 persen turun menjadi 94,89 persen tahun 2014. Sebaliknya dilihat dari segi lamanya diberi ASI tahun 2014 mengalami kenaikan walaupun tidak berarti, dimana tahun 2013 rata-rata lamanya diberi ASI selama 13,75 bulan naik menjadi 13,76 bulan. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 rata-rata lamanya balita diberi ASI mengalami penurunan tetapi intensitas lamanya pemberian ASI semakin bertambah. Hal ini bisa terjadi karena semakin bertambahnya perempuan yang bekerja dalam membantu ekonomi rumah tangganya sehingga semakin berkurang waktu untuk mengurus rumah tangganya yang berakibat pada semakin berkurangnya intensitas pemberian ASI pada balita.

Dari segi kesehatan menunjukkan bahwa semakin lama balita diberi ASI akan semakin baik untuk pertumbuhannya baik dari segi fisik maupun perkembangan jiwanya, karena semakin lama pemberian ASI seorang ibu akan semakin dekat dengan anaknya. Selain itu bagi ibunya akan semakin bertambah panjang lamanya waktu kembalinya tingkat kesuburan seorang ibu setelah melahirkan, yang berakibat pada semakin lamanya seorang ibu mengalami kehamilan berikutnya.

Selain melalui pemberian ASI, pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan cara pemberian imunisasi kepada balita. Secara umum persentase jumlah balita yang pernah diberi imunisasi di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 cukup tinggi. Dari tabel 2.2 terlihat bahwa hanya sebagian kecil balita di Tangerang Selatan yang belum pernah mendapat imunisasi, yaitu sebesar 0,39 persen. Hal ini menunjukkan dari 100 balita di Kota Tangerang Selatan ada sekitar 1 balita yang belum pernah mendapatkan imunisasi. Ini bisa terjadi kemungkinan karena masih adanya ibu yang belum memahami

pentingnya imunisasi atau masih adanya sebagian kecil masyarakat yang menganggap bahwa imunisasi dilarang dalam ajaran agama.

Bila dilihat perkembangannya persentase balita yang pernah diberi Imunisasi mengalami kenaikan sebesar 1,67 persen, dimana tahun 2013 persentase balita yang pernah diberi Imunisasi sebesar 97,94 persen dan tahun 2014 naik menjadi 99,61 persen.

Tingginya persentase balita yang mendapatkan imunisasi dan diberi ASI diharapkan sejalan dengan meningkatnya derajat kesehatan balita sehingga di masa depan akan timbul anak-anak yang sehat dan kuat untuk melanjutkan serta meningkatkan jalannya roda pembangunan khususnya di Kota Tangerang Selatan.

2.3. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan mencakup peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Tujuan penyediaan fasilitas kesehatan adalah tersedianya fasilitas kesehatan yang mudah dan murah bagi semua lapisan masyarakat. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan penduduk karena mudah terjangkau dan murah, terutama bagi penduduk yang berpenghasilan menengah kebawah karena biaya berobat relatif murah dan terjangkau.

Jumlah Rumah Sakit di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 tercatat sebanyak 27 unit, Puskesmas sebanyak 25 unit, dan Puskesmas Pembantu sebanyak 7 unit, yang tersebar di 7 kecamatan. Hal lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan bidang kesehatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan reproduksi. Seperti diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kematian balita dan ibu melahirkan adalah kelahiran yang tidak aman. Penanganan proses kelahiran

sampai dengan setelah kelahiran yang berkualitas dan tepat waktu diharapkan akan mengurangi resiko kematian bayi dan ibu. Penolong kelahiran balita oleh tenaga medis meliputi dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lain. Dukun yang membantu proses kelahiran (dukun beranak) tidak dicakup dalam tenaga medis lainnya walaupun sudah mendapat pelatihan dari Kementerian Kesehatan.

Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, famili atau lainnya.

Berdasarkan Gambar 1.3, pada tahun 2014 penolong kelahiran di Tangerang Selatan hampir semua dilaksanakan oleh tenaga medis, yaitu sebesar 97,78 persen. Sedangkan yang ditolong oleh tenaga nonmedis hanya sebesar 2,22 persen. Sebagian besar penolong kelahiran oleh tenaga medis dilakukan oleh bidan, yaitu sebesar 48,99 persen, sedangkan penolong kelahiran oleh dokter sebesar 48,79 persen. Hal ini diduga karena biaya kelahiran yang ditolong oleh dokter relatif lebih mahal daripada biaya kelahiran yang dilakukan oleh bidan. sehingga jumlah kelahiran yang ditolong oleh bidan lebih banyak dibanding kelahiran yang ditolong oleh dokter.

Tabel 2.3
Persentase Penolong Kelahiran di Kota Tangerang Selatan
Tahun 2013 - 2014

Penolong Kelahiran	Tahun	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)

Dokter	46,51	48,79
Bidan	52,44	48,99
Dukun Bersalin	1,06	1,59
Tenaga Paramedis Lain	0,00	0,64
Lainnya	0,00	0,00
Total	100	100

Sumber : Susenas 2013 – 2014

Bila dibandingkan antara tahun 2013 dan 2014 seperti yang ada pada tabel 2.3 terlihat bahwa persentase penolong kelahiran yang dilakukan oleh Dokter mengalami kenaikan yang cukup berarti, pada tahun 2013 sebesar 46,51 persen naik menjadi 48,79 persen tahun 2014 (naik 2,28 persen). Sebaliknya untuk penolong kelahiran yang dilakukan oleh Bidan mengalami sedikit penurunan sekitar 3,45 persen yaitu sebesar 52,44 persen tahun 2013 turun menjadi 48,99 persen. Tetapi sebaliknya untuk penolong kelahiran yang dilakukan oleh Dukun Bersalin mengalami sedikit kenaikan, pada tahun 2013 sebesar 1,06 persen naik menjadi 1,59 persen pada tahun 2014 (turun 0,53 persen) Tetapi sebaliknya ada penolong kelahiran yang dilakukan oleh tenaga paramedis lainnya, walaupun kejadiannya sedikit yaitu sekitar 0,64 persen. Untuk tenaga penolong kelahiran yang dilakukan oleh Tenaga Lainnya tidak ada pada tahun 2014, sama seperti tahun 2013 Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan penduduk Kota Tangerang Selatan dalam memanfaatkan tenaga kesehatan modern terutama Dokter dalam proses kelahiran dan tidak menggunakan lagi Tenaga Lain selain Dukun Bersalin.

Tabel 2.4
Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Obat yang
Digunakan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013- 2014

Jenis Pengobatan	2013	2014

(1)	Jumlah	Laki-laki	Jumlah	Laki-laki
	(2)	(3)	(2)	(3)
Modern	90,35	94,69	93,47	94,00
Tradisional	2,34	3,93	1,46	2,54
Lainnya	0,22	0,00	2,13	1,20
Modern+Tradisional	4,77	1,38	2,94	2,25
Modern+ Lain	1,12	0,00	0,00	0,00
Tradisional+ Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Modern+ Tradisional + Lain	1,19	0,00	0,00	0,00

Sumber : Susenas Tahun 2013-2014

Dalam mengatasi gangguan/keluhan kesehatan yang dialaminya, penduduk berusaha melakukan upaya pengobatan baik dengan cara berobat sendiri maupun berobat jalan pada fasilitas kesehatan. Pada tahun 2014, persentase penduduk Kota Tangerang Selatan yang mengalami keluhan kesehatan mengalami penurunan yang cukup berarti yaitu sebesar 6,59 persen dimana tahun 2013 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 22,37 persen dan tahun 2014 sebesar 15,78 persen. Dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, ada 57,67 persen diantaranya melakukan pengobatan sendiri dengan cara membeli obat modern, obat tradisional maupun dengan cara pengobatan tradisional seperti kerokan, pijat atau lainnya. Penduduk yang melakukan pengobatan sendiri sebagian besar menggunakan obat modern yaitu sebanyak 94,00 persen. Sedangkan yang berobat menggunakan kombinasi obat modern dengan obat tradisional sebanyak 2,25 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2013 penduduk Kota Tangerang Selatan yang berobat dengan menggunakan obat modern mengalami kenaikan yang cukup berarti yaitu sebesar 3,65 persen (tahun 2014 sebesar 94,00 persen dan tahun 2013 sebesar 90,35 persen). Yang menggunakan obat tradisional juga mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 0,20 persen. Pada tahun 2013 yang menggunakan obat tradisional

sebesar 2,34 persen naik menjadi 2,54 persen pada tahun 2014. Dan yang menggunakan obat lainnya juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,98 persen, dimana tahun 2013 sebesar 0,22 persen, pada tahun 2014 naik menjadi 0,98 persen. Penduduk yang menggunakan pengobatan modern dan tradisional mengalami penurunan dari 4,77 persen pada tahun 2013 turun menjadi 2,25 persen pada tahun 2014. Demikian juga penduduk yang menggunakan obat modern dan lainnya pada tahun 2014 sudah tidak ada lagi dimana pada tahun 2013 yang menggunakan obat tradisional dan lainnya masih ada sebesar 1,12 persen.

Sedangkan penduduk yang menggunakan obat tradisional dan lainnya sudah tidak ada sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran penduduk Kota Tangerang Selatan menggunakan obat modern cukup tinggi. Tingginya persentase penduduk yang menggunakan obat modern tidak terlepas dari status Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah perkotaan dengan mayoritas penduduk berpendidikan cukup tinggi (*well educated*) dan banyaknya fasilitas kesehatan yang ada. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Ketersediaan fasilitas kesehatan serta akses yang mudah dan relatif murah merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang lengkap memudahkan penduduk yang sakit agar cepat mendapatkan pelayanan pengobatan sehingga pada akhirnya derajat kesehatan penduduk akan meningkat.

Tabel 2.5
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat
di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013- 2014

Tempat Berobat	2013	2014		
	Jumlah	Laki-laki	Perempuan n	Jumlah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Sakit	13,68	21,42	20,56	20,98
Puskesmas (termasuk Pustu)	24,79	22,26	32,74	27,64
Klinik KIA/BP	52,45	47,96	31,54	39,53
Petugas Kesehatan Lain	6,10	4,10	6,63	5,40
Pengobatan Tradisional	2,07	1,88	4,88	3,42
Lainnya	0,90	2,38	3,65	3,03
Penduduk Berobat Jalan	10,36	12,64	14,61	13,63

Sumber : Susenas Tahun 2013-2014

Dalam menangani keluhan kesehatan penduduk di Kota Tangerang Selatan selain mengobati sendiri juga ada yang melakukan pengobatan dengan berobat jalan ke fasilitas kesehatan yang ada. Sekitar 44,87 persen diantaranya dengan melakukan berobat jalan. Persentase penduduk di Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 yang mengalami kesakitan kesehatan ada sebanyak 6,26 persen yang terdiri dari laki-laki sebesar 5,94 persen dan perempuan sebesar 6,58 persen. Bila dilihat menurut jenis pengobatan, penduduk Kota Tangerang Selatan ada yang melakukan pengobatan sendiri ataupun dengan cara berobat jalan. Hal ini berhubungan dengan berat ringannya penyakit yang diderita, ataupun berhubungan dengan akses kesehatan yang ada.

Penduduk yang melakukan pengobatan dengan jalan mengobati sendiri sudah dijelaskan dihalaman sebelumnya (Tabel 2.4). Penduduk Kota Tangerang Selatan yang berobat jalan ketika mengalami gangguan kesehatan dengan jalan berobat ke fasilitas kesehatan yang ada. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat bahwa penduduk yang melakukan pengobatan dengan berobat jalan mengalami kenaikan yaitu sebesar 3,27 persen dimana tahun 2013 penduduk yang berobat jalan sebesar 10,36 persen naik menjadi 13,63 persen tahun 2013. Dilihat dari tempat melakukan pengobatan penduduk Kota Tangerang Selatan paling

banyak memanfaatkan Klinik KIA/Balai Pengobatan sebagai tempat berobat jalan yaitu sebanyak 39,53 persen. Penduduk yang memilih Puskesmas/Pustu sebanyak 27,64 persen, dan penduduk yang berobat ke Rumah Sakit sebanyak 20,98 persen. Sedangkan yang memilih pengobatan tradisional dan lainnya sebanyak 2,07 persen. Seperti disajikan pada tabel 2.4 terlihat bahwa jenis fasilitas kesehatan selain Klinik KIA/BP adalah Puskesmas/Pustu dan Rumah Sakit yang sering digunakan dan menjadi alternatif pilihan penduduk. Hal ini bisa terjadi selain karena akses ke sarana kesehatan tersebut khususnya di Kota Tangerang Selatan lebih mudah dan biaya masih relatif terjangkau oleh mayoritas penduduk di Kota Tangerang Selatan, serta tingkat pengetahuan penduduk akan pentingnya kesehatan cukup tinggi. Apalagi program di Kota Tangerang Selatan yang membebaskan biaya berobat bagi warganya yang mempunyai KTP Kota Tangerang Selatan serta bertambahnya sarana kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas.

BAB III

PENDIDIKAN

<http://pangselkota.bps.go.id>

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan dan merupakan faktor yang dominan dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan selain dibutuhkan dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul seiring perubahan zaman juga dapat membawa pengaruh positif dalam berbagai sendi-sendi kehidupan, sehingga tidaklah mengherankan apabila pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian yang lebih.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Indikator pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat melalui tingkat kemampuan membaca dan menulis (angka melek huruf) penduduk. Kemampuan membaca dan menulis dibedakan terhadap huruf latin, huruf lainnya, dan tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Dengan memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin akan menjadikan seseorang lebih mudah memahami dan menyerap berbagai informasi baik dari media cetak maupun elektronik sehingga akan menambah pengetahuan bagi dirinya. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan buta huruf adalah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

3.1. Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Salah satu kebutuhan dasar penduduk untuk berkomunikasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Dimana hal ini merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk dalam proses

Pendidikan bermasyarakat, sehingga penduduk dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di Kota Tangerang Selatan.

Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari indikator angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator pencapaian program pendidikan di Indonesia. Secara matematis angka ini memperlihatkan rasio antara jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia sepuluh tahun keatas dalam satuan ratusan. Indikator tersebut penting mengingat melek huruf merupakan pintudari segala ilmu pengetahuan.

Tabel 3.1
Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013-2014

Indikator	2013	2014		
	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angka melek huruf(%)	98,62	99,03	96,85	97,95
Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,99	12,00	11,11	11,56

Sumber : Susenas Tahun 2013 - 2014

Pada tahun 2014 terdapat 97,95 persen penduduk berusia 10 tahun keatas di Kota Tangerang Selatan yang sudah mampu membaca dan menulis huruf latin, sedangkan sisanya sebanyak 2,05 persen masih belum/tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Bila dibandingkan antara penduduk laki-laki dan perempuan, persentase penduduk laki-laki yang melek huruf lebih tinggi dibanding perempuan yaitu 99,03 persen berbanding 96,85 persen seperti terlihat pada Tabel 3.1. Bila dibandingkan dengan tahun 2013 maka AMH tahun 2014 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,67 persen. Tahun 2013 AMH penduduk Kota Tangerang Selatan sebesar 98,62 persen dan tahun 2014 sebesar 97,95 persen.

Indikator lain untuk melihat tingkat pendidikan adalah angka rata-rata lama sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa lama rata-rata penduduk suatu wilayah duduk di bangku sekolah dalam mengikuti program pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 mencapai 11,56 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Tangerang Selatan baru dapat bersekolah hingga jenjang SMA kelas dua. Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih lama dibandingkan perempuan, yaitu 12,00 tahun berbanding 11,11 tahun. Penduduk laki-laki dapat bersekolah hingga jenjang SMA kelas tiga sedangkan penduduk perempuan hingga jenjang SMA kelas dua.

Bila dilihat perkembangannya dari tahun 2013 hingga tahun 2014, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tangerang Selatan mengalami sedikit peningkatan. Tahun 2013 sebesar 11,48 persen naik menjadi 11,56 pada tahun 2014. Hal ini berarti rata-rata penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2013 pada jenjang pendidikan SMA kelas dua. Begitu pula tahun 2014 rata-rata bersekolah pada jenjang pendidikan SMA kelas dua. (Untuk penduduk laki-laki sudah tercapai SMA kelas tiga sedangkan penduduk perempuan baru mendekati kelas 2 SMA, seperti yang terlihat di tabel 3.1 diatas).

3.2. Tingkat Pendidikan yang ditamatkan dan Partisipasi Sekolah

Selain indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, gambaran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat juga dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk. Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal yang merupakan gambaran kualitas SDM suatu wilayah. Dengan semakin banyaknya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan di pendidikan menengah keatas maka kualitas SDM suatu wilayah akan

Pendidikan

semakin baik, karena dengan SDM yang memadai maka akan lebih mudah untuk mengembangkan kemampuan, kreatifitas dan kualitasnya.

Tabel 3.2
 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang
 Ditamatkan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 - 2014

Tingkat Pendidikan	2013	2014		
	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak/BelumTamat SD/MI/Sederajat	11,09	11,77	11,99	11,88
SD/MI/Sederajat	15,82	13,64	17,81	15,75
SMP/Sederajat	17,49	16,15	18,58	17,38
SMA/SMK/Sederajat	35,77	35,89	32,75	34,30
Universitas/PT	19,83	22,54	18,86	20,68
J U M L A H	100	100	100	100

Sumber : Susenas Tahun 2013 - 2014

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa pada tahun 2014 sebagian besar penduduk usia 10 tahun keatas di Kota Tangerang Selatan mampu menamatkan pendidikan tertinggi sampai SMA/ sederajat, yaitu sebanyak 34,30 persen dan yang menamatkan sampai Perguruan Tinggi sebesar 20,68 persen. Sedangkan penduduk yang dapat menamatkan pendidikan tertinggi hingga tingkat SMP/ sederajat mencapai 17,38 persen, menamatkan hingga tingkat SD/ sederajat mencapai 15,75 persen. Sedangkan yang tidak atau belum tamat SD sebesar 11,88 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, maka terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk laki-laki sedikit lebih baik dibandingkan penduduk perempuan, terutama untuk tingkat pendidikan yang ditamatkan SMA/ sederajat dan Universitas/PT. Pada tahun 2014 tingkat pendidikan yang ditamatkan SMA/ sederajat untuk laki-laki sebesar 35,89 persen sedangkan untuk perempuan sebesar 32,75 persen. Demikian juga untuk tingkat pendidikan yang ditamatkan Universitas/PT, untuk laki-laki sebesar

22,54 persen sedangkan perempuan sebesar 18,86 persen. Kondisi ini kemungkinan antara lain disebabkan oleh faktor budaya pada sebagian masyarakat yang lebih mengutamakan pendidikan untuk anak laki-laki dibandingkan anak perempuan karena laki-laki adalah yang bertanggung jawab dalam rumah tangganya.

Apabila dilihat perubahannya dari tahun 2013 ke tahun 2014 persentase penduduk 10 tahun keatas tingkat pendidikan yang ditamatkan untuk tamat Universitas/PT dan Tidak/BelumTamat SD/Sederajat yang mengalami peningkatan, sedangkan yang lainnya mengalami penurunan persentasenya. Yang menamatkan Universitas/PT tahun 2013 sebesar 19,83 pada tahun 2014 naik menjadi 20,68 persen. Yang Tidak/Belum Tamat SD/Sederajat pada tahun 2013 sebesar 11,09 persen pada tahun 2014 naik menjadi 11,88 persen. Sebaliknya penduduk usia 10 tahun keatas yang menamatkan pendidikan SMA/SMK/Sederajat, SMP/ sederajat dan Tamat SD mengalami penurunan. Yang menamatkan pendidikan SMA/SMMK/Sederajat pada tahun 2013 sebesar 35,77 persen, pada tahun 2014 turun menjadi 34,30 persen, SMP/ sederajat tahun 2013 sebesar 17,49 persen turun menjadi 17,38 persen tahun 2014. Demikian juga penduduk usia 10 tahun keatas yang Tamat SD/ sederajat turun dari 15,82 persen tahun 2013 menjadi 15,75 persen tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang ditamatkan penduduk di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan. Lebih dari setengah penduduk usia 10 tahun keatas menamatkan pendidikannya SMA/ sederajat dan Universitas/PT. Tentunya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tangerang Selatan berhubungan erat dengan adanya peningkatan taraf hidup kesejahteraan penduduknya.

Tabel 3.3
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Kota Tangerang Selatan
Tahun 2013 - 2014

Kelompok Umur	2013	2014
---------------	------	------

	Persentase	Persentase
(1)	(2)	(3)
Usia 7 – 12 tahun		
Laki-laki	99,77	99,21
Perempuan	98,74	99,74
Jumlah	99,25	99,47
Usia 13 – 15 tahun		
Laki-laki	94,36	94,60
Perempuan	96,91	98,18
Jumlah	95,59	96,32
Usia 16 – 18 tahun		
Laki-laki	76,61	77,27
Perempuan	63,86	65,14
Jumlah	69,96	74,72

Sumber : Susenas Tahun 2013 - 2014

Partisipasi penduduk dalam mengikuti program pendidikan di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dari besarnya indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS adalah 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. APS disajikan dalam tiga tingkatan usia, yaitu APS anak usia 7-12 tahun, usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun.

Pada tahun 2014 APS Kota Tangerang Selatan untuk anak usia 7-12 tahun sebesar 99,47 persen. Angka ini menunjukkan bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun masih bersekolah, kurang dari 1 (satu) persen yang tidak bersekolah. Anak yang tidak bersekolah terdiri dari anak yang sudah

Pendidikan memasuki usia sekolah tetapi belum bersekolah dan anak yang putus sekolah. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, untuk usia 7-12 tahun anak laki-laki lebih rendah partisipasinya dibanding anak perempuan, juga untuk anak usia 13-15 tahun partisipasi sekolah anak laki-laki lebih rendah dibanding anak perempuan. Demikian juga untuk usia 16-18 tahun partisipasi sekolah anak laki-laki lebih rendah dibanding anak perempuan.

Pada tahun 2014 APS anak usia 7-12 tahun sebesar 99,47, APS anak usia 13-15 tahun sebesar 96,32 persen dan APS anak usia 16-18 tahun sebesar 74,72 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia 7-12 tahun hampir semuanya sedang bersekolah, untuk anak usia 13-15 tahun dari 100 anak ada sekitar 4 orang yang tidak bersekolah. Sedangkan untuk anak usia 16-18 tahun keadaannya lebih rendah, yaitu dari 100 anak usia 16-18 tahun hanya sekitar 74 anak yang sedang bersekolah sedangkan yang tidak bersekolah ada sekitar 26 anak. Semakin tinggi usia anak, partisipasi sekolahnya semakin menurun. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan.

Bila dibandingkan dengan tahun 2013 terlihat bahwa APS tahun 2014 mengalami peningkatan untuk semua kelompok umur. APS usia 7-12 tahun naik sebesar 0,22 persen, APS usia 13-15 tahun naik sebesar 0,73 persen dan APS usia 16-18 mengalami kenaikan yang cukup berarti yaitu sebesar 4,76 persen. APS usia 7-12 tahun sebesar 99,25 persen tahun 2014 naik menjadi 99,47 persen tahun 2014. Kenaikan ini sebagian besar terjadi pada anak perempuan yaitu dari 98,74 persen tahun 2013 naik menjadi 99,63 persen pada tahun 2014. APS usia 13-15 tahun sebesar 95,59 persen pada 2013 naik menjadi 96,32 persen tahun 2014. Demikian juga APS usia 16-18 tahun juga mengalami kenaikan. Tahun 2013 APS usia 16-18 tahun sebesar 69,96 persen naik menjadi 74,72 persen. Selain APS sebagai salah

Pendidikan

satu indikator pendidikan juga ada Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga digunakan sebagai indikator pendidikan.

Tabel 3.4
APM dan APK Kota Tangerang Selatan menurut
Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2014

Jenjang Pendidikan	2013		2014	
	APM(%)	APK (%)	APM(%)	APK (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/Sederajat				
Laki-laki	98,28	108,37	98,52	105,99
Perempuan	97,80	107,48	92,96	99,57
Jumlah	98,04	107,92	98,33	105,53
SMP/Sederajat				
Laki-laki	70,74	86,81	72,47	80,22
Perempuan	79,34	85,19	80,64	96,89
Jumlah	74,90	86,02	76,48	82,35
SMA/Sederajat				
Laki-laki	54,20	68,80	62,97	87,08
Perempuan	51,76	65,58	58,16	79,68
Jumlah	52,93	67,13	63,39	84,38

Sumber : Susenas Tahun 2013 – 2014

APM dan APK digunakan untuk melihat partisipasi anak/masyarakat terhadap dunia pendidikan. APM merupakan persentase penduduk usia sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Sedangkan APK merupakan persentase penduduk yang masih sekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Dari Tabel 3.4 terlihat bahwa pada tahun 2014 APM penduduk di Kota Tangerang Selatan untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat tercatat sebesar 98,33 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia 7-

12 tahun di Kota Tangerang Selatan ada sekitar 98 anak diantaranya sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/Sederajat. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat masing-masing tercatat sebesar 76,48 persen dan 63,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 13-15 tahun ada sekitar 76 anak yang bersekolah di SMP/ sederajat dan dari 100 anak usia 16-18 tahun ada sekitar 63 anak yang bersekolah di SMA/ sederajat.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2014, APM laki-laki untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat lebih tinggi dibanding APM perempuan. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Namun sebaliknya untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat APM laki-laki lebih rendah dibanding perempuan. Pada tahun 2014 untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat APM laki-laki sebesar 72,47 persen sedangkan APM perempuan sebesar 80,64 persen. Untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat pada tahun 2014 APM laki-laki sebesar 98,52 persen sedangkan perempuan sebesar 92,96 persen. Jenjang pendidikan SMA/ sederajat APM laki-laki sebesar 62,97 persen sedangkan perempuan 58,16 persen. Selain APS dan APM digunakan juga APK untuk melihat partisipasi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Pada Tahun 2013 APK jenjang pendidikan SD/ sederajat tercatat lebih dari 100 persen yaitu sebesar 107,92 persen, bila dilihat menurut jenis kelamin, maka APK anak laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan yaitu sebesar 108,37 persen untuk anak laki-laki dan 107,48 persen anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) 6 tahun di Kota Tangerang Selatan sudah tercapai. Namun untuk APK SMP/ sederajat belum mencapai angka 100, yaitu mencapai 86,02 persen. Bahkan APK SMA/ sederajat baru mencapai 67,13 persen.

Berdasarkan Tabel 3.4, terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara indikator APM dan APK di semua jenjang pendidikan. Selisih antara nilai APM dan APK menunjukkan jumlah anak yang umurnya ada dibawah ataupun diatas kelompok umur pada jenjang sekolah tertentu. Pada tahun 2014 untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat APM sebesar 98,33 persen dan APK sebesar 105,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 anak yang sedang bersekolah di SD/ sederajat ada sekitar 98 anak yang berusia 7-12 tahun, sedangkan 7 anak lainnya usianya kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Demikian juga halnya untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat APM sebesar 76,48 persen sedangkan APK sebesar 82,35 persen. Ini menunjukkan bahwa dari 82 anak yang masih bersekolah di SMP/ sederajat ada sekitar 76 anak yang berusia 13-15 tahun, sedangkan 6 anak lainnya berusia kurang dari 13 tahun atau diatas 15 tahun. APM SMA/ sederajat sebesar 63,39 persen sedangkan APK sebesar 84,38 persen. Ini menunjukkan bahwa dari 84 anak yang sedang bersekolah di SMA/ sederajat ada sekitar 63 anak yang berusia 16-18 tahun, sedangkan 21 anak lainnya berusia dibawah 16 tahun atau diatas 18 tahun.

Bila dibandingkan antara tahun 2013 dan 2014 dari tabel 3.4 terlihat bahwa APM disemua tingkatan jenjang pendidikan mengalami kenaikan. Bila dilihat menurut jenis kelamin khususnya dijenjang pendidikan SD/ sederajat angka APM perempuan mengalami penurunan, pada tahun 2013 APM perempuan sebesar 97,80 persen turun menjadi 92,96 persen tahun 2014. Sedangkan APM laki-laki naik dari 98,28 persen tahun 2013 naik menjadi 98,52 persen tahun 2014. Pada tahun 2013 APM laki-laki jenjang pendidikan SMP/ sederajat sebesar 70,74 persen naik menjadi 72,47 persen tahun 2014. Demikian juga untuk perempuan, APM SMP/ sederajat dari 79,34 persen tahun 2013 naik menjadi 80,64 persen tahun 2014. Untuk APM SMA/ sederajat pada tahun 2013 untuk laki-laki sebesar 54,20 persen naik menjadi 62,97 persen tahun 2014. Demikian juga untuk anak perempuan

Pendidikan tahun 2013 sebesar 51,76 persen naik menjadi 58,16 persen tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa untuk semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan terutama untuk APM jenjang pendidikan SMA/ sederajat yang mengalami peningkatan cukup berarti yaitu sebesar 10,46 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat khususnya di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan apalagi didukung oleh kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya SPP dari SD sampai dengan SMA yang mendorong terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, disamping pemahaman masyarakat akan pentingnya sekolah yang cukup tinggi.

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

<http://tangselkota.bps.go.id>

Data ketenagakerjaan dewasa ini semakin diperlukan, terutama untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta produktifitas tenaga kerja. Sangat masuk akal jika analisis mengenai kualitas sumber daya manusia biasanya menempatkan faktor ketenagakerjaan sebagai salah satu dimensi yang vital. Penciptaan lapangan pekerjaan sebagai fokus pembangunan bidang ketenagakerjaan saat ini diharapkan memberikan efek langsung pada pengurangan jumlah penduduk miskin dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut konsep yang dipakai BPS dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), bekerja diartikan sebagai kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan digambarkan melalui beberapa indikator karakteristik ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan tersebut diantaranya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat kesempatan kerja (TKK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Indikator ketenagakerjaan tersebut merupakan gambaran kegiatan penduduk yang termasuk sebagai Penduduk Usia Kerja (PUK) dalam bekerja memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan. PUK sebagaimana konsep International Labour Organization (ILO) adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Berdasarkan kegiatannya dalam

kaitan ketenagakerjaan, penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. PUK yang masuk dalam angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan. Sedangkan kegiatan PUK yang tergolong bukan angkatan kerja adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

4.1. Indikator Ketenagakerjaan

Indikator Ketenagakerjaan merupakan indikator ekonomi yang mempunyai arti penting dalam beberapa aspek. Dari indikator ketenagakerjaan ini dapat diperoleh gambaran dan permasalahan ketenagakerjaan, seperti penduduk usia kerja, angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK).

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas.

Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang mengurus rumah tangga, sekolah atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja, biasanya dinyatakan dalam persen.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja, biasanya dinyatakan dalam persen.

Tabel 4.1
Indikator Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2014

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penduduk Usia Kerja	561.384	557.443	1.118.827
2. Angkatan Kerja	448.587	256.734	705.321
a. Bekerja	418.685	237.813	656.498
b. Pengangguran	29.902	18.921	48.823
3. Bukan Angkatan Kerja :	112.797	300.709	413.506
a. Sekolah dan Mengurus RT	79.933	281.100	361.033
b. Lainnya	32.864	19.609	52.473
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	79,91	46,06	63,04
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,67	7,37	6,92
6. Tingkat Kesempatan Kerja (%)	93,33	92,63	93,08

Sumber : Sakernas Tahun 2014

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2014 yang ditampilkan pada Tabel 4.1, penduduk Kota Tangerang Selatan yang masuk kategori penduduk usia kerja sebanyak 1.118.827 jiwa, terdiri atas 561.384 laki-laki dan 5.433 perempuan. Penduduk usia kerja yang tergolong dalam angkatan kerja sebanyak 705.321 jiwa, terdiri atas 448.587 laki-laki dan 256.734 perempuan. Angkatan kerja yang bekerja sebanyak 656.498 jiwa terdiri dari 418.685 laki-laki dan 237.813 perempuan dan yang menjadi pengangguran sebanyak 48.823 jiwa (29.902 laki-laki dan 18.921 perempuan). Sedangkan penduduk yang bukan tergolong angkatan kerja sebanyak 413.506 jiwa, dimana 361.033 jiwa sedang sekolah dan mengurus rumah tangga dan 52.473 jiwa melakukan kegiatan lain.

Partisipasi penduduk usia kerja dalam bekerja dan mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan rumah tangganya dapat dilihat melalui angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), pada tahun 2014 persentase penduduk yang masuk dalam usia kerja dan aktif dalam bekerja dan mencari pekerjaan (TPAK) tercatat sebesar 63,04 persen. Angka tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa ada sekitar 63 persen dari penduduk usia kerja di Kota Tangerang Selatan yang berpotensi untuk mendapatkan pendapatan/penghasilan, walaupun di dalamnya termasuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, maka ada perbedaan yang signifikan antara TPAK penduduk laki-laki dan perempuan. TPAK laki-laki sebesar 79,91 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 46,06 persen.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam kegiatan ekonomi belum maksimal. Implikasinya banyak perempuan yang masih menjadi kelompok bukan angkatan kerja. Mengurus rumah tangga, adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan perempuan. Diduga pula, pergeseran nilai-nilai budaya terutama dalam hal bekerja secara ekonomis, yang terjadi di Kota Tangerang Selatan belum bergerak cepat. Istilah bahwa yang mencari pekerjaan (mencari nafkah) adalah kewajiban laki-laki masih cukup kuat berakar dalam budaya kita.

Salah satu informasi penting lain yang didapat dari kegiatan Sakernas 2014 adalah diperolehnya angka pengangguran. Informasi ini vital, terutama berkenaan dengan kemampuan sektor-sektor ekonomi yang ada untuk menyerap tenaga kerja kedalam aktivitas ekonomi produktif. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini

memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional.

Berdasarkan Tabel 4.1, secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 sebesar 6,92 persen. Sedangkan jika dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan, dimana TPT laki-laki sebesar 6,67 persen sedangkan TPT perempuan sebesar 7,37 persen. Kondisi ini salah satunya diakibatkan oleh relatif masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan dibanding laki-laki, khususnya pendidikan SMA keatas seperti yang terlihat pada tabel 3.2 bahwa pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang pendidikan SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, sehingga perempuan kalah bersaing dalam mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

Kebalikan dari TPT, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Tangerang Selatan sebesar 93,33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktifitas ekonomi di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 belum bisa menyerap seluruh angkatan kerja yang tersedia yaitu sekitar 93 persen, masih ada sekitar 7 persen dari angkatan kerja yang belum terserap dan menjadi pengangguran. Angka TPT sebesar 6,92 persen menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan khususnya oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan serta para pengusaha dan seluruh lapisan masyarakat.

4.2. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Tabel 4.2 menunjukkan sebaran penduduk yang bekerja menurut sektor/lapangan usaha, yaitu Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa-jasa dan sektor/lapangan usaha lainnya (Pertambangan/penggalian, Angkutan dan telekomunikasi, Listrik, gas, air bersih, Keuangan dan Konstruksi). Dalam sudut pandang

perekonomian, untuk mengetahui sektor apa yang paling dominan di suatu wilayah biasanya dilihat dari peranan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja dan pembentukan nilai tambah (PDRB). Namun tidak selamanya sektor yang dominan menyerap tenaga kerja menjadi sektor yang paling banyak menciptakan nilai tambah. Perbedaan produktifitas tenaga kerja antar sektor dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi penyebab terjadinya hal tersebut.

Tabel 4.2
Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Sektor/Lapangan Usaha	Persentase		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	0,75	0,00	0,48
2. Industri Pengolahan	7,75	6,12	7,16
3. Perdagangan, Hotel, Restoran	22,44	36,64	27,58
4. Jasa – jasa	27,69	36,59	30,91
5. Lainnya	41,37	20,65	33,86
T o t a l	100	100	100
Jumlah	418.685	237.813	656.498

Sumber : Sakernas Tahun 2014

Jika dilihat penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor yang ada, mayoritas penduduk di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 bekerja di sektor lainnya yaitu sebesar 33,86 persen, kemudian sektor jasa-jasa, yaitu sebesar 30,91 persen dan sektor perdagangan sebesar 27,58 persen. Sementara itu, sektor industri pengolahan sebesar 7,16 persen dan sektor pertanian masih ada 0,48 persen. Bila dilihat menurut jenis kelamin di Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran dan Sektor Jasa-jasa pekerja perempuan lebih banyak dibandingkan pekerja laki-laki. Penduduk perempuan lebih banyak yang bekerja di dua sektor tersebut karena selain

bekerja untuk membantu mencari nafkah, mereka masih bisa mengatur waktu untuk mengurus keluarga di rumah.

Tabel 4.3
Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2014 (persen)

Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Pengusaha	19,18	20,53	19,67
a. Berusaha sendiri	14,15	18,09	15,58
b. Berusaha dibantu pekerja takdibayar	3,09	1,39	2,47
c. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	1,93	1,06	1,62
II. Buruh/karyawan	79,03	74,43	77,37
III. Pekerja bebas	1,41	0,29	1,01
IV. Pekerja keluarga/tak dibayar	0,37	4,75	1,96
Jumlah	100	100	100

Sumber : Sakernas Tahun 2014

Jika dilihat menurut status pekerjaan maka dapat dilihat bahwa sektor formal memiliki peranan yang signifikan dalam hal penyerapan tenaga kerja di Kota Tangerang Selatan. Pada tabel 4.3 terlihat bahwa proporsi pekerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar (kategori status formal) tercatat sebesar 78,99 persen, sisanya sebesar 21,01 persen masuk kategori status informal. Tingginya peranan sektor formal dalam menyerap pekerja dapat mengindikasikan kemajuan perekonomian Kota Tangerang Selatan karena pekerja status formal lebih terjamin haknya, terutama dalam hal pendapatan rutin yang diterima. Bila dilihat menurut jenis kelamin, maka terdapat perbedaan yang cukup berarti antara persentase pekerja sektor formal berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan dimana pekerja laki-laki lebih banyak persentasenya dibanding perempuan yaitu sebesar 80,96 persen sedangkan perempuan sebesar 75,49 persen.

Salah satu dimensi penting terkait dengan ketenagakerjaan adalah kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang semakin meningkat. Namun, kesempatan kerja di sektor formal dirasakan tidak sesuai antara jumlah yang diminta (*demand*) dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan (*supply*) oleh para pencari kerja. Akibatnya, sektor informal dianggap sebagai jawaban yang tepat dan mudah atas masalah ketenagakerjaan. Sektor informal tampaknya memainkan peranan cukup penting di dunia, meskipun terkesan diabaikan atau bahkan dianaktirikan. Di beberapa kota besar di negara berkembang peranan sektor informal dalam menyerap angkatan kerja cukup besar (*www.unchs.org*), yaitu di New Delhi, India (61,4 persen) dan Dhaka, Bangladesh (60 persen). Sektor informal di Kota Tangerang Selatan yang mampu menyerap 21,01 persen telah menjadi alternatif bagi sebagian pekerja yang tidak tertampung pada sektor formal.

4.3. Jumlah Jam Kerja

Dalam kajian ketenagakerjaan, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran apabila memiliki jam kerja selama seminggu dibawah jam kerja normal. Kesepakatan tentang jumlah jam kerja normal di Indonesia adalah minimal 35 jam selama seminggu. Istilah lain dari persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal disebut sebagai pengangguran kentara (*visible underemployed*) atau setengah pengangguran.

Pada konsep yang dipakai BPS di Sakernas, jam kerja juga digunakan sebagai penentu lapangan pekerjaan utama bila seseorang mempunyai lebih dari satu jenis pekerjaan. Maksudnya, bila seseorang bekerja pada lebih dari satu lapangan pekerjaan yang berbeda (berlainan kode KBLI), maka yang dianggap sebagai lapangan pekerjaan utama adalah lapangan pekerjaan yang jam kerjanya lebih banyak dari lapangan pekerjaan lainnya. Sedangkan

untuk lapangan pekerjaan yang jam kerjanya lebih kecil dianggap sebagai pekerjaan tambahan/pekerjaan sampingan.

Sedangkan bila seorang pekerja dalam seminggu yang lalu (dalam periode survei) sementara tidak bekerja (jam kerja =0 jam), maka pekerja tersebut tidak dikategorikan sebagai setengah pengangguran atau pengangguran terbuka. Pengecualian ini berlaku karena sebenarnya statusnya masih sebagai pekerja, tetapi karena selama pencacahan sedang cuti/sakit/menunggu panen/sebagainya, sehingga menyebabkan pekerja tersebut tidak melakukan aktifitas seperti biasanya.

Tabel 4.4
Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014

Jam Kerja	2013	2014		
	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< 10 Jam	2,12	3,49	5,55	4,24
10 - 34 Jam	8,60	7,74	16,48	10,91
≥ 35 Jam	89,28	88,77	77,97	84,85
Total	100	100	100	100

Sumber : Sakernas Tahun 2013 - 2014

Distribusi penduduk yang bekerja berdasarkan kelompok jam kerja digambarkan dalam Tabel 4.4. Secara global, bila dikelompokkan dalam jam kerja normal (35 jam seminggu), pada tahun 2014 sebanyak 84,85 persen pekerja memiliki jam kerja diatas 35 jam seminggu. Jam kerja antara 10–34 jam dalam seminggu ada 10,91 persen dan jam kerja seminggu kurang dari 1 jam ada 4,24 persen. Penduduk yang jam kerjanya kurang dari jam kerja normal (35 jam seminggu) inilah yang disebut sebagai **setengah pengangguran**.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, maka penduduk laki-laki yang bekerja dengan jam kerja normal persentasenya lebih besar dibanding perempuan, yaitu 88,77 persen berbanding 77,97 persen. Sebaliknya pada mereka yang tergolong setengah pengangguran, pekerja wanita lebih mendominasi dibanding laki-laki, yaitu 16,48 persen pekerja perempuan berbanding 7,74 persen pekerja laki-laki.

Bila dibandingkan antara tahun 2013 dan tahun 2014 terlihat bahwa jumlah pekerja di Kota Tangerang Selatan yang bekerja sesuai jam kerja normal ada sedikit penurunan yaitu sebesar 4,43 persen dimana pada tahun 2013 sebesar 89,28 persen turun menjadi menjadi 84,85 tahun 2014. Sebaliknya pekerja yang tergolong setengah pengangguran yaitu yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu terjadi kenaikan yaitu sebesar 2,31 persen di mana pada tahun 2013 sebesar 8,60 persen naik menjadi 10,91 persen tahun 2014.

BAB V

**KEMISKINAN DAN POLA
KONSUMSI**

<http://tangselkotatbps.go.id>

Kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya mengarah pada kemiskinan absolut, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk mencapai standar hidup minimal tertentu yang telah ditetapkan. Walaupun pemerintah telah banyak menggulirkan berbagai program yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, namun masih ada beberapa yang dianggap belum tepat sasaran, bahkan gagal dalam mengentaskan kemiskinan. Beberapa program dianggap belum menyentuh masalah mendasar yang terjadi pada masyarakat sehingga hasilnya tidak efektif. Selain itu, program yang ada juga dinilai masih bersifat reaktif, jangka pendek dan parsial.

Tabel 5.1
Indikator Kemiskinan Kabupaten Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2013

Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Pandeglang	10,25	1,39	0,33	230.364
Kab. Lebak	9,50	1,26	0,24	214.047
Kab. Tangerang	5,78	0,82	0,18	335.291
Kab. Serang	5,02	0,58	0,10	218.862
Kota Tangerang	5,26	0,58	0,10	398.513
Kota Cilegon	3,99	0,32	0,05	295.100
Kota Serang	5,92	0,72	0,14	236.039
Kota Tangerang Selatan	1,75	0,22	0,04	378.303
Banten	5,89	1,02	0,29	288.733

Sumber : BPS Provinsi Banten

Berdasarkan tabel 5.1 terlihat bahwa pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan sebesar 1,75 persen. Bila dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Banten maka Kota Tangerang Selatan adalah yang paling kecil. Terkecil kedua adalah Kota

Cilegon sebesar 3,99 persen, Kabupaten Serang sebesar 5,02 persen dan Kota Tangerang sebesar 5,26 persen. Sedangkan yang paling banyak persentase penduduk miskinnya adalah Kabupaten Pandeglang sebesar 10,25 persen, Kabupaten Lebak sebesar 9,50 persen dan Kota Serang sebesar 5,92 persen. Tetapi bila dilihat dari nilai rupiah yang dibutuhkan seseorang dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhannya, yang paling besar adalah Kota Tangerang yaitu sebesar Rp. 398.513, disusul Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 378.303, Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 335.291 dan Kota Cilegon sebesar Rp. 295.100. Sedangkan yang paling kecil adalah Kabupaten Lebak yaitu sebesar Rp. 214.047, Kabupaten Serang sebesar Rp. 218.682 dan Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 230.364.

Tabel 5.2

Indikator Kemiskinan Kabupaten Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2014

Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Pandeglang	9,50	1,07	1,02	237.111
Kab. Lebak	9,17	0,97	0,15	219.177
Kab. Tangerang	5,26	0,63	0,11	351.789
Kab. Serang	4,87	0,44	0,06	223.190
Kota Tangerang	4,91	0,44	0,06	421.554
Kota Cilegon	3,81	0,24	0,03	306.253
Kota Serang	5,70	0,55	0,08	242.977
Kota Tangerang Selatan	1,68	0,17	0,03	401.696
Banten	5,51	0,79	0,18	315.819

Sumber : BPS Provinsi Banten

Dari tabel 5.2 terlihat bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2014 Kota Tangerang Selatan sebesar 1,68 persen. Bila dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Banten maka Kota Tangerang Selatan adalah yang paling sedikit. Paling sedikit kedua adalah Kota Cilegon

sebesar 3,81 persen, kemudian Kabupaten Serang sebesar 4,87 persen dan Kota Tangerang sebesar 4,91 persen. Sedangkan yang paling banyak persentase penduduk miskinnya adalah Kabupaten Pandeglang sebesar 9,50 persen, Kabupaten Lebak sebesar 9,17 persen dan Kota Serang sebesar 5,70 persen. Tetapi bila dilihat dari nilai rupiah yang dibutuhkan seseorang dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhannya, yang paling besar adalah Kota Tangerang yaitu sebesar Rp. 421.554, disusul Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 401.696, Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 351.789 dan Kota Cilegon sebesar Rp. 306.253. Sedangkan yang paling kecil adalah Kabupaten Lebak yaitu sebesar Rp. 219.177, Kabupaten Serang sebesar Rp. 223.190, Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 237.111 dan Kota Serang sebesar Rp. 242.977. Bila dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Banten maka ada 5 (lima) wilayah yang berada dibawah rata-rata Provinsi yaitu Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak. Sedangkan yang diatas rata-rata Garis Kemiskinan Provinsi ada 3 (tiga) yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Bila dibandingkan antara tahun 2013 dan tahun 2014 terlihat bahwa persentase penduduk miskin mengalami penurunan di semua Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten. Penurunan persentase penduduk miskin terbesar adalah Kabupaten Pandeglang naik sebesar 0,75 persen, pada tahun 2013 sebesar 10,25 persen turun menjadi 9,50 persen pada tahun 2014, Kabupaten Tangerang turun 0,52 persen, tahun 2013 sebesar 5,78 persen turun menjadi 5,26 persen tahun 2014 dan Kota Tangerang turun 0,35 persen, pada tahun 2013 sebesar 5,26 persen turun menjadi 4,91 persen tahun 2014. Kabupaten Lebak turun 0,33 persen, Kota Serang turun 0,22 persen, Kota Cilegon turun 0,18 persen, Kabupaten Serang turun 0,15 persen dan yang paling kecil penurunannya yaitu Kota Tangerang Selatan turun 0,07

persen, karena Kota Tangerang Selatan adalah kota yang paling sedikit persentase penduduk miskinnya.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat **Kedalaman** kemiskinan (P1) dan tingkat **Keparahan** kemiskinan (P2).

Tingkat kedalaman kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Sedangkan angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Tangerang Selatan tahun 2014 sebesar 0,17, Kota Cilegon sebesar 0,24, Kota Tangerang dan Kabupaten Serang sama yaitu sebesar 0,44, Kabupaten Tangerang sebesar 0,63 persen, sedangkan Provinsi Banten sebesar 0,79 persen, dan yang terbesar adalah Kabupaten Pandeglang sebesar 1,07, dan Kabupaten Lebak sebesar 0,97. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan tingkat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap batas

kemiskinan, lebih baik dibanding Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten. Demikian juga bila dilihat dari Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2), bahwa Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon tahun 2014 lebih baik dibanding Kabupaten/Kota lainnya yaitu sebesar 0,03, selanjutnya Kabupaten Serang dan Kota Tangerang yaitu sebesar 0,06 dan Kabupaten Tangerang sebesar 0,11 sedangkan yang paling tinggi adalah Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar 1,02 persen dan Kabupaten Lebak sebesar 0,15 persen sedangkan Provinsi Banten sebesar 0,18.

Bila dilihat perkembangannya tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 persentase penduduk miskin semua kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Banten mengalami penurunan, demikian juga bila dilihat dari tingkat Kedalaman kemiskinan (P1), tetapi bila dilihat dari tingkat Keparahan kemiskinan (P2) dari tabel 5.1 dan tabel 5.2 hanya ada 1 (satu) kabupaten yang mengalami kenaikan Indeks Keparahannya (P2) yaitu Kabupaten Pandeglang., dimana pada tahun 2013 Indeks Keparahannya (P2) sebesar 0,33 persen naik menjadi 1,02 persen tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Pandeglang terjadi kesenjangan yang lebih lebar diantara penduduk miskinnya yaitu sebesar 0,33 pada tahun 2013, naik menjadi 1,02 tahun 2014 (naik 0,69), sedangkan kabupaten kota lainnya penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskinnya semakin merata.

Penurunan tingkat Keparahan kemiskinan (P2) terbesar ada di Kabupaten Lebak yaitu sebesar 0,24 pada tahun 2013 turun menjadi 0,15 tahun 2014 (turun 0,09 persen), Kabupaten Tangerang dan Kota Serang turun 0,07 persen, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang turun 0,04 persen, Kota Cilegon turun 0,02 persen dan Kota Tangerang Selatan turun 0,01 persen. Tetapi bila dilihat dari angka tingkat Keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2014, Indeks Keparahan yang terkecil adalah Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 0,03 persen. Selanjutnya adalah

Kabupaten Serang dan Kota Tangerang yaitu sebesar 0,06 persen, Kota Serang sebesar 0,08 persen, Kabupaten Tangerang sebesar 0,11 persen, Kabupaten Lebak sebesar 0,15 persen dan terparah adalah Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar 1,02 persen.

Selain tingkat kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2), pola konsumsi masyarakat juga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat. Pola konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat serta pendapatan. Budaya setempat dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada sekelompok masyarakat dimana mereka berada. Pendapatan seseorang akan mempengaruhi pola konsumsinya. Dengan menggunakan data pengeluaran dapat terlihat pola konsumsi rumah tangga secara umum melalui indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Pada umumnya makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat kesejahteraan penduduk.

Pada kelompok penduduk dengan tingkat pendapatan rendah biasanya pengeluaran akan lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan. Penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan standar minimum tertentu biasanya dikategorikan sebagai penduduk miskin. Di Indonesia, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) tidak mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Standar kebutuhan hidup layak sesuai hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978 diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kalori sehari, ditambah sejumlah pengeluaran untuk bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Jumlah uang

tersebut kemudian dikatakan sebagai batas **garis kemiskinan**. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu wilayah mencerminkan tingkat pendapatan penduduk, semakin banyak jumlah penduduk miskin mengindikasikan rendahnya tingkat pendapatan penduduk di wilayah tersebut.

Ukuran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat dilihat dengan menggunakan tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Sesungguhnya tingkat pendapatan dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Pendapatan yang rendah, tentunya mempersempit pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga pada kelompok masyarakat dengan penghasilan terbatas, pemenuhan konsumsi yang bersifat primer (makanan) menjadi pilihan alternatif yang utama. Sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder seperti: rekreasi, membeli barang-barang penunjang hobby. Dengan keterbatasan penghasilan itu pula yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Pada umumnya data yang menunjukkan pendapatan masyarakat sangat sulit untuk diperoleh. Sehingga pengeluaran, dalam hal ini pengeluaran rumah tangga merupakan *proxy* (pendekatan) dari pendapatan. Pengeluaran rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Biasanya pengeluaran makanan dapat mencapai titik jenuh, sementara pengeluaran untuk non makanan hampir tidak terbatas. Tarik-menarik antara dua pengeluaran tersebut dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pengeluaran untuk non makanan dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang semakin baik karena bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya selain makanan seperti pendidikan, kesehatan bahkan rekreasi serta kebutuhan lainnya. Argumentasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan maka akan semakin kecil porsi pendapatan yang

dibelanjakan untuk makanan. Sebaliknya semakin tinggi pendapatan maka akan semakin tinggi pula porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk non makanan. Menurut kajian beberapa literatur, tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat bila pengeluaran untuk non makanan sudah lebih dari 60 persen.

Mengamati data hasil Susenas 2014 Kota Tangerang Selatan seperti yang tersaji pada Tabel 5.3, terlihat bahwa proporsi rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Tangerang Selatan untuk kelompok makanan mencapai 40,35 persen dari total pengeluaran. Sedangkan proporsi rata-rata pengeluaran untuk kelompok bukan makanan sekitar 59,65 persen. Atau dalam bentuk besaran rupiah rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan sebesar Rp 568.147 sedangkan untuk konsumsi bukan makanan sebesar Rp 839.758, dengan total pengeluaran perkapita sebulan sebesar Rp 1.407.905. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan pada umumnya mengalami peningkatan dilihat dari Rata-rata Pengeluaran Perkapita Perbulan penduduk Kota Tangerang Selatan yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 pengeluaran makanan sebesar Rp. 534.254 naik menjadi 568.147 pada tahun 2014, demikian juga untuk penegluaran bukan makanan, tahun 2013 sebesar Rp. 789.822 naik menjadi Rp. 839.758 pada tahun 2014. Walaupun dilihat dari persentasenya antara pengeluaran makanan dan pengeluaran bukan makanan tahun 2013 dan ttahun 2014 masih sama yaitu 40,35 persen untuk jenis pengeluaran makanan dan 59,65 persen untuk jenis pengeluaran bukan makanan.

Tabel 5.3
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Perbulan Penduduk
Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 - 2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014
-------------------	------	------

Pola Konsumsi dan Golongan Pengeluaran

	Pengeluaran (Rp)	Persentase (%)	Pengeluaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pengeluaran makanan	534 254	40,35	568 147	40,35
1. Padi-padian	48 129	3,63	52 253	3,71
2. Telur dan susu	43 222	3,26	41 639	2,96
3. Makanan dan minuman jadi	207 460	15,67	225 401	16,01
4. Tembakau dan sirih	48 636	3,67	46 380	3,29
5. Lainnya	186 808	14,11	202 474	14,38
B. Pengeluaran bukan makanan	789 822	59,65	839 758	59,65
1. Perumahan	333 946	25,22	359 064	25,50
2. Aneka barang dan jasa	317 807	24,00	225 497	16,02
3. Biaya pendidikan	81 816	6,18	92 340	6,56
4. Biaya kesehatan	34 863	2,63	45 544	3,23
5. Lainnya	21 389	1,62	117 314	8,33
Jumlah	1 324 076	100	1 407 905	100

Sumber: Susenas Tahun 2013-2014.

Pada tahun 2014 bila dilihat dari komposisi jenis pengeluaran untuk kelompok makanan, maka rata-rata pengeluaran terbesar adalah makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar Rp. 225.401 (16,01 persen) disusul kelompok lainnya, yaitu sebesar Rp. 202.474 (14,38 persen) dari total pengeluaran. Kemudian diikuti oleh padi-padian sebesar Rp. 52.253 (3,71 persen), tembakau dan sirih sebesar Rp. 46.380 (3,29 persen), serta telur dan susu sebesar Rp. 41.639 (2,96 persen). Sedangkan pada kelompok bukan makanan, rata-rata pengeluaran terbesar adalah untuk pengeluaran perumahan sebesar Rp. 359.064 (25,50 persen) diikuti kelompok aneka barang dan jasa sebesar Rp. 225.497 (16,02 persen) kemudian pengeluaran biaya lainnya sebesar Rp. 117.314 (8,33 persen), biaya pendidikan sebesar Rp. 92.340 (6,56 persen), dan pengeluaran biaya kesehatan sebesar Rp. 45.544 (3,23 persen) dari total pengeluaran. Bila dilihat antara pengeluaran untuk kesehatan dan pengeluaran tembakau dan sirih, tahun 2014 masih memperlihatkan bahwa lebih banyak untuk pengeluaran tembakau dan sirih

dibandingkan untuk pengeluaran kesehatan walau selisihnya tidak seberapa yaitu beda Rp. 836.

Bila dibandingkan dengan pola konsumsi tahun 2013 dan tahun 2014 secara persentase masih untuk jenis pengeluaran makanan dan bukan makanan yaitu masing-masing untuk pengeluaran makanan sebesar 40,35 persen dan bukan makanan sebesar 59,65 persen dari total pengeluaran rata-rata perkapita perbulan penduduk di Kota Tangerang Selatan. Tetapi untuk sub kelompok pengeluaran makanan dan minuman jadi terjadi kenaikan yaitu tahun 2013 sebesar 15,67 persen naik menjadi 16,01 persen tahun 2014. Demikian juga untuk sub kelompok perumahan, pendidikan dan kesehatan. Tahun 2013 pengeluaran perumahan sebesar 25,22 persen naik menjadi 25,50 persen, pengeluaran pendidikan tahun 2013 sebesar 6,18 persen naik menjadi 6,56 persen tahun 2014, juga biaya kesehatan tahun 2013 sebesar 2,63 persen naik menjadi 3,23 persen. Kenaikan yang cukup berarti yaitu pengeluaran lainnya dimana tahun 2013 sebesar 1,62 persen naik menjadi 8,33 persen tahun 2014.

Pola konsumsi penduduk suatu wilayah selain dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan penduduknya. Semakin tinggi tingkat pendapatannya akan semakin rendah proporsi pengeluaran makanannya. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendapatannya akan semakin tinggi proporsi pengeluaran makanannya.

Tabel 5.4
Persentase Penduduk Menurut Rata-rata Pengeluaran Perkapita
Perbulan Dirinci Per Kabupaten/Kota Tahun 2014

Pola Konsumsi dan Golongan Pengeluaran

Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Golongan Pengeluaran Perkapita (%)						
	Kurang dari Rp. 200.000	200.000 – 299.999	300.000 – 499.999	500.000 – 749.999	750.000 – 999.999	1.000.000 ke atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Pandeglang	1.42	15.92	47.76	20.87	7.78	6.25	100.00
Kab. Lebak	0.99	7.75	45.92	30.15	8.94	6.25	100.00
Kab. Tangerang	0.00	2.72	25.42	29.58	16.14	26.14	100.00
Kab. Serang	0.91	10.03	36.25	24.57	13.72	14.51	100.00
Kota Tangerang	0.00	0.38	12.35	19.45	16.50	51.33	100.00
Kota Cilegon	0.43	2.40	21.66	24.89	14.97	35.65	100.00
Kota Serang	1.05	8.18	33.29	24.15	12.48	20.86	100.00
Kota Tangerang Selatan	0.00	0.39	10.36	21.48	13.86	53.91	100.00
Prov. Banten	0.44	5.11	27.40	24.91	13.74	28.40	100.00

Sumber : Susenas 2014

Pada tabel 5.4 terlihat bahwa persentase rata-rata golongan pengeluaran perkapita perbulan penduduk di Kota Tangerang Selatan terbanyak ada pada golongan pengeluaran Rp. 1.000.000 ke atas yaitu sebesar 53,91 persen. Disusul golongan pengeluaran Rp. 500.000 – Rp. 749.999 sebesar 21,48 persen dan golongan pengeluaran Rp. 750.00 – Rp. 999.999 sebesar 13,86 persen. Persentase rata-rata golongan pengeluaran perkapita perbulan penduduk di Kota Tangerang Selatan terkecil ada pada golongan pengeluaran Rp. 200.000 – Rp. 299.999 sebesar 0,39 persen sedangkan persentase penduduk dengan golongan pengeluaran perkapita perbulan dibawah Rp 200.000 tidak ada.

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Banten dari tabel 5.4 terlihat bahwa persentase rata-rata golongan pengeluaran perkapita perbulan untuk penduduk yang pengeluarannya Rp. 1.000.000 keatas, tertinggi adalah Kota Tangerang Selatan sebesar 53,91 persen. Diikuti Kota Tangerang sebesar 51,33 persen, Kota Cilegon sebesar 35,65 persen

dan Kabupaten Tangerang sebesar 26,14 persen. Sedangkan persentase terendah adalah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak sebesar 6,25 persen.

Tetapi untuk persentase rata-rata golongan pengeluaran perkapita perbulan untuk penduduk yang pengeluarannya Rp. 750.000 – Rp. 999.999 persentase tertinggi adalah Kota Tangerang yaitu sebesar 16,50 persen. Diikuti Kabupaten Tangerang sebesar 16,14 persen, Kota Cilegon sebesar 14,97 persen dan Kota Tangerang Selatan sebesar 13,86 persen. Kabupaten Serang sebesar 13,72 persen, Kota Serang sebesar 12,48 persen dan Kabupaten Lebak dan kabupaten Pandeglang masing-masing sebesar 8,94 persen dan 7,78 persen.

Sebaliknya untuk persentase rata-rata golongan pengeluaran perkapita perbulan penduduk untuk golongan pengeluaran kurang dari Rp. 200.000 -299.999 persentase terbesar ada di Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar 1,42 persen diikuti Kota Serang sebesar 1,05 persen dan Kabupaten Lebak sebesar 0,91 persen, sedangkan di 3 (tiga) wilayah yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tidak ada pengeluaran perkapita perbulan kurang dari Rp. 200.000.

Hal tersebut menunjukkan bahwa diwilayah Tangerang, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, tingkat pendapatan penduduknya relatif lebih tinggi dibanding daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Ini juga mengindikasikan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh penduduk di daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya relatif lebih mahal dibanding daerah lainnya. Tetapi bila dilihat dari penyebaran persentase rata-rata golongan pengeluaran perkapita yang sangat timpang adalah Kota Tangerang Selatan dimana lebih dari setengahnya ada pada golongan rata-rata pengeluaran

perkapita perbulan Rp. 1.000.000 keatas, sebaliknya untuk golongan rata-rata pengeluaran perkapita kurang dari Rp. 200.000 perbulan tidak ada. Untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan bisa dilihat dari angka Gini Ratio yaitu untuk wilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2014 sebesar 0,38. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan sedang, tidak terlalu rendah dan tidak tinggi.

<http://tangselkota.bps.go.id>

BAB VI

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

<http://tangerketa.bps.go.id>

Salah satu kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang adalah papan atau hunian tempat tinggal. Selain sebagai tempat berlindung dan mempertahankan diri dari kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial, rumah juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berbanding lurus dengan kualitas/kondisi rumahnya. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan perumahanpun semakin meningkat. Namun keterbatasan lahan untuk pemukiman dan penawaran perumahan yang hanya tertuju pada suatu golongan masyarakat tertentu merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membangun perumahan yang layak huni, sementara tingkat pendapatan penduduk masih relatif rendah. Akibatnya adalah masih tingginya jumlah rumah tangga/penduduk yang menempati rumah tidak layak huni, baik dilihat dari sisi kualitas rumah, lingkungan, kesehatan maupun ukuran luasnya. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat kualitas sumber daya manusia yang akan datang akan sangat dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan permukiman di mana masyarakat tinggal menempatinnya.

Berbagai fasilitas perumahan yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut diantaranya dapat dilihat dari kualitas material yang mencakup antara lain jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Kualitas ketiga unsur tersebut secara umum dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain itu, berbagai indikator fasilitas penunjang lain seperti sumber air minum, luas lantai hunian, tempat buang

air besar, sumber penerangan dan status kepemilikan rumah juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2014, sekitar 82,73 persen rumah tangga di Kota Tangerang Selatan sudah menempati rumah milik sendiri/orang tua/saudara. Sedangkan sisanya sebesar 17,27 persen rumah tangga masih menempati rumah sewa/kontrak ataupun rumah dinas/bebas sewa. Masih tingginya rumah tangga yang menempati rumah sewa/kontrak tidak terlepas dari daya tarik Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah perkotaan yang sedang berkembang pesat sehingga mampu menarik penduduk dari wilayah lain untuk datang, terutama dengan tujuan bekerja. Namun demikian, tingginya harga lahan/properti menyebabkan para pendatang tersebut hanya mampu menyewa rumah maupun apartemen tempat tinggal.

Tetapi bila dilihat perkembangannya dari tahun sebelumnya maka persentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri/orang tua/saudara tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebesar 6,26 persen, dimana tahun 2013 sebesar 76,47 persen naik menjadi 82,73 persen tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan penduduk Kota Tangerang Selatan semakin meningkat dengan bertambahnya rumah tangga yang mempunyai rumah sendiri/orang tua/saudara.

Kriteria rumah yang layak dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal adalah apabila rumah tersebut memiliki dinding terluas yang terbuat dari

tembok atau kayu, atap terluas berupa beton atau genteng serta luas lantai terluas bukan berupa tanah. Selain itu menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah yang memiliki luas lantai per orang minimal 10m². Sedangkan menurut Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat, kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktifitas dasar manusia di dalam rumah yang meliputi; tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci, masak dan ruang gerak lainnya. Sementara menurut Kementerian Kesehatan, salah satu persyaratan rumah sehat adalah jika penguasaan luas lantai perkapitanya minimal 8 . Jika melihat hasil kajian, maka kebutuhan ruang per orang adalah 9 dengan perhitungan rata-rata ketinggian langit-langit adalah 2,80 m.

Tabel 6.1

Indikator Fasilitas Perumahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2013-2014

Indikator Fasilitas Perumahan	Persen	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Rumah milik sendiri/orang tua/saudara	76,47	82,73
Lantai terluas bukan tanah	99,85	99,88
Luas lantai rumah perkapita < 10 m ²	16,37	11,64
Atap rumah dari beton dan genteng	82,88	79,61
Dinding rumah berupa tembok	97,80	99,19
Mengonsumsi air minum kemasan dan air ledeng	52,38	53,88
Bahan bakar memasak:		
- Gas	98,23	97,91
- Minyak tanah	0,09	0,23
- Kayu bakar	0,19	0,58
- Lainnya	1,49	1,27
Menggunakan fasilitas buang air besar	99,95	100
Menggunakan Listrik PLN dan nonPLN	100	100

Sumber : Susenas Tahun 2013 - 2014

Dari tabel 6.1 terlihat bahwa masih terdapat sekitar 11,64 persen rumah tangga di Kota Tangerang Selatan yang penguasaan luas lantai rumah perkapitanya kurang dari 10 m². Jika rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Kota Tangerang Selatan sebanyak 4 jiwa per rumah tangga, maka luas minimal sebuah rumah sehat menurut WHO adalah seluas 40 . Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka rumah tangga yang luas lantai perkapitanya kurang dari 10 m² terjadi penurunan yang cukup berarti yaitu sebesar 4,73 persen. Sementara itu persentase rumah tangga dengan lantai terluas yang masih berupa tanah masih ada walaupun kurang dari 1 (satu) persen yaitu sebesar 0,12 persen.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Pada tahun 2014, persentase rumah tinggal dengan atap terluas berupa beton atau genteng di Kota Tangerang Selatan mencapai 79,61 persen (turun 3,27 persen) dibanding tahun 2013. Bila dilihat dari dinding terluasnya maka hampir seluruhnya rumah tangga di Kota Tangerang Selatan menggunakan dinding berupa tembok yaitu sebesar 99,19 persen (naik 1,39 persen) dibanding tahun 2013.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan nyaman tidaknya rumah tinggal tersebut. Salah satu fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya air bersih serta jamban yang dimiliki sendiri. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan oleh pemerintah. Seperti terlihat pada Tabel 6.1, persentase rumah tangga yang mengkonsumsi air minum kemasan dan air ledeng sebagai sumber air minum dan masak sekitar 53,88

persen (naik 1,50 persen) dibanding tahun 2013. Selebihnya masih menggunakan sumber air dari sumur bor/ pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, air hujan dan lainnya. Jadi masih lebih dari setengahnya penduduk di Kota Tangerang Selatan yang mengkonsumsi air selain air minum kemasan dan air ledeng.

Sistem pembuangan kotoran manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tangga yang berhubungan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2014, seluruh rumah tangga di Kota Tangerang Selatan sudah menggunakan fasilitas buang air besar yaitu sebesar 100 persen (naik 0,05 persen) dibanding tahun 2013.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan dan bahan bakar untuk memasak. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan NonPLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Hasil Susenas tahun 2014 menunjukkan bahwa seluruh penduduk di Kota Tangerang Selatan sudah menggunakan Listrik. Sementara itu persentase rumah tangga yang menggunakan bahan bakar gas untuk memasak sebesar 97,91 persen (turun sebesar 0,32 persen) dibanding tahun 2013. Sedangkan untuk pemakaian minyak tanah, kayu bakar mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya

tetapi untuk bahan bakar lainnya mengalami penurunan sebesar 0,22 persen dimana mereka tidak menggunakan bahan bakar tetapi menggunakan Magic Com atau sejenisnya untuk menanak nasi ataupun mereka yang tidak pernah memasak. . Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.1.

<http://tangselkota.bps.go.id>

BAB VII

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

<http://tangserkota.bps.go.id>

Indikator Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Dikatakan cukup baik karena IPM merupakan indikator gabungan yang mencakup tiga indikator pembangunan yang dominan dan memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Mulai tahun 2014 Indikator Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan metode baru yaitu penyempurnaan dari metode sebelumnya yaitu dengan:

1. Mengganti tahun dasar PNB per Kapita dari 2005 menjadi 2011
2. Merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.

Tiga indikator penyusun IPM tersebut adalah:

- a) Indikator Kesehatan yang digambarkan melalui Indeks Angka Harapan Hidup (AHH).
- b) Indikator Pengetahuan yang digambarkan melalui Indeks Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (MYS), dan
- c) Indikator Ekonomi yang digambarkan melalui Indeks Kemampuan Daya Beli Masyarakat/*Purchasing Power Parity (PPP)*.

Indikator penting tersebut terwujud dalam suatu ukuran pencapaian, yaitu “umur panjang dan sehat” yang diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir, “berpengetahuan dan berketerampilan” yang diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,

serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pendapatan perkapita yang disesuaikan. Ketiga indikator tersebut dianggap dapat mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Penghitungan IPM dengan menggunakan ketiga indikator tersebut di atas merupakan formula yang digunakan oleh UNDP (*United Nation Development Program*) sejak tahun 1990 untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu negara dan dipublikasikan dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

Tabel 7.1
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Komponen IPM	Mak	Min	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	20	Sesuai standar global (UNDP)
Harapan Lama Sekolah	18	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan (Rp)	26.572.352**	1.007.436*	UNDP menggunakan PDB perkapita riil yang disesuaikan

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan

7.1. Indikator Kesehatan

Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara umum, angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) dipilih sebagai salah satu

komponen dalam penghitungan IPM untuk indikator bidang kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penting dalam mengukur *longevity* (panjang umur) yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu daerah, karena semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk hidup lebih lama semakin tinggi dan sebaliknya semakin buruk kesehatan seseorang maka kecenderungan hidupnya pun semakin pendek, hal ini tentunya tidak terlepas dari kekuasaan Tuhan.

Untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung dengan menggunakan dua data dasar, yaitu rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Prosedur penghitungan angka harapan hidup sejak lahir () dilakukan dengan menggunakan Software *Mortpack Life*. Setelah mendapatkan angka harapan hidup sejak lahir, selanjutnya dilakukan penghitungan angka indeks (Indeks Kesehatan) dengan cara membandingkan angka tersebut terhadap angka yang sudah distandarkan.

Pada tahun 2014 angka harapan hidup penduduk Kota Tangerang Selatan sebesar 72,11. Angka ini menunjukkan bahwa setiap penduduk Kota Tangerang Selatan (bayi) yang lahir pada tahun 2014 mempunyai peluang/harapan untuk hidup selama 72,11 tahun. Dengan menggunakan rumus di atas akan didapat angka indeks harapan hidup sebesar 78,52. Indeks angka harapan hidup merupakan indeks penyusun IPM yang menggambarkan pembangunan manusia di bidang kesehatan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencapaian pembangunan di bidang kesehatan baru mencapai 78,52 persen dari kondisi ideal. Angka indeks harapan hidup yang lebih besar dibandingkan tahun 2013 (78,50)

menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat Kota Tangerang Selatan semakin membaik.

7.2. Indikator Pengetahuan

Indeks pengetahuan disusun oleh dua indikator pendidikan, yaitu angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (MYS).

7.2.1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harkat dan martabat manusia akan meningkat diantaranya apabila yang bersangkutan cerdas. Hidup sehat dan cerdas diyakini akan meningkatkan kemampuan produktivitas seseorang sehingga akan meningkatkan mutu peran warga tersebut sebagai pelaku (*agent*) pembangunan. Tingkat kecerdasan (*intelligence*) seseorang pada titik waktu tertentu merupakan produk gabungan dari keturunan (*heredity*), pendidikan dan pengalamannya. Perkembangan tingkat pendidikan salah satunya dapat dievaluasi dengan melihat besarnya indikator angka harapan lama sekolah (HLS).

HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka harapan lama sekolah di Kota Tangerang Selatan tahun 2014 sebesar 13,58. Disbanding tahun 2013 terdapat kenaikan sebesar 0,33, tahun 2013 angka harapan lama sekolah sebesar 13,24. Dari angka harapan lama sekolah sebesar 13,58 tahun 2014 didapat angka indeks harapan lama sekolah sebesar 75,44 persen dari angka maksimal.

7.2.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / *Mean Years of Schooling (MYS)*

Selain angka melek huruf, indikator penyusun indeks pengetahuan lainnya adalah rata-rata lama sekolah (RLS). AMH dan RLS diharapkan mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk.

Keterangan:

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

f_i = Frekuensi penduduk 15 tahun keatas pada jenjang pendidikan

j = Lama sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan yang ditamatkan atau tingkat pendidikan yang ditamatkan atau tingkat pendidikan yang pernah diduduki

i = Jenjang pendidikan

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah lamanya penduduk 15 tahun keatas bersekolah dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. Angka rata-rata lama sekolah dihitung dengan mengolah dua variabel secara simultan, yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Penghitungan rata-rata lama sekolah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, dihitung lama sekolah untuk masing-masing individu dengan menggunakan pola hubungan antar variabel, tahap selanjutnya dihitung indeks rata-rata lama sekolah dengan formula sebagai berikut.

Pada tahun 2014 angka rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tangerang Selatan adalah 11,56 tahun dan merupakan yang tertinggi jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Angka RLS yang melampaui angka wajib pendidikan dasar 9 tahun menunjukkan pembangunan di bidang pendidikan sudah terlaksana cukup baik. Dengan berpatokan sasaran ideal RLS adalah 15 tahun, maka didapat indeks RLS sebesar 77,07 persen. Dengan demikian dapat diartikan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Tangerang Selatan baru mencapai 77,07 persen dari rata-rata lama sekolah ideal, yaitu 15 tahun.

7.2.3. Indeks Pengetahuan (Indeks HLS + Indeks RLS)

Indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah digabung menjadi satu dengan perbandingan 1 : 1, sehingga diperoleh indeks pendidikan dengan formula sebagai berikut:

Indeks pengetahuan akan bernilai antara 0 (kondisi terburuk) sampai dengan 100 (kondisi terbaik). Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dapat menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat suatu wilayah. Pada tahun 2014 angka indeks pengetahuan Kota Tangerang Selatan sebesar 76,26. Hal ini berarti pembangunan yang selama ini dilakukan baru membawa tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat Kota Tangerang Selatan mencapai 76,26 persen dari kondisi dari pencapaian maksimal. Dibanding tahun 2013, ada peningkatan sebesar 1,22 persen dimana indeks pengetahuan tahun 2013 sebesar 75,04.

7.3. Indikator Ekonomi

Indikator Ekonomi digambarkan melalui angka indeks tingkat daya beli masyarakat/*Purchasing Power Parity (PPP)*. Kemampuan daya beli merupakan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup secara layak. Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Dengan dimasukkannya variabel PPP kedalam penghitungan IPM, maka IPM jelas lebih "lengkap" dalam merefleksikan kondisi suatu masyarakat yang memiliki peluang hidup panjang dan sehat serta memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Namun demikian, UNDP melihat bahwa kondisi seperti itu belum memberikan gambaran yang ideal. Menurutnya, masyarakat ideal selain harus memiliki peluang hidup panjang dan sehat serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, juga harus mempunyai peluang/kesempatan kerja/berusaha yang memadai sehingga akan memperoleh/menghasilkan sejumlah "uang" yang memiliki daya beli (*Purchasing Power*).

Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut :

1. Hitung pengeluaran konsumsi perkapita dari Susenas Modul (=A).
2. Mendeflasikan nilai A dengan IHK ibukota propinsi yang sesuai (=B).
3. Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan *International Comparison Project (ICP)* dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara. Data dasar yang digunakan

adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai beberapa komoditi yang telah ditentukan (27 komoditi) dan diperoleh dari Susenas Modul.

4. Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C).
5. Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai *marginal utility* dari C.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus:

Angka indeks tingkat daya beli (PPP) menunjukkan tingkat kemampuan daya beli masyarakat. Semakin besar angka indeks PPP maka semakin tinggi pula kesempatan masyarakat untuk dapat memenuhi standar kehidupan yang layak. Pada tahun 2014, angka konsumsi perkapita riil yang disesuaikan Kota Tangerang Selatan tercatat sebesar Rp 14.361.000. Dengan demikian, maka indeks tingkat daya beli masyarakat Kota Tangerang Selatan mencapai 81,20. Angka tersebut mengindikasikan bahwa tingkat daya beli masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai jalan untuk memenuhi standar kehidupan yang layak baru mencapai 81,20 persen dari pencapaian maksimal.

Tabel 7.2

Indeks Komponen Penyusun IPM Kota Tangerang Selatan
Tahun 2013-2014

Komponen IPM	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Indeks Angka Harapan Hidup	78,50	78,52
Indeks Pengetahuan	75,04	76,26
Indeks Tingkat Daya Beli	80,87	81,20

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan

7.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia, merupakan indeks gabungan dari tiga komponen 'penilai' kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis sumber daya manusianya memiliki kualitas yang baik pula. Indeks pembangunan manusia menunjukkan seberapa besar tingkat pencapaian dari pembangunan yang telah dilakukan selama ini dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai indeks pembangunan manusia adalah rata-rata dari ketiga indeks, yaitu indeks angka harapan hidup (AHH), indeks pengetahuan dan indeks tingkat daya beli (PPP). IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran.

Tabel 7.3.

Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Komponen IPM dan
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten 2013-2014

Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi / Kab/Kota	AHH (thn)	AMH (%)	MYS (thn)	PPP (ribu Rp)	IPM		Peringkat IPM	
					2013	2014	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BANTEN	69,13	12,31	8,19	11.150	69,47	69,89	8	8
Pandeglang	62,91	13,38	6,45	7.589	61,35	62,06	7	7
Lebak	65,88	11,88	5,84	7.977	61,13	61,64	8	8
Tangerang	68,98	11,65	8,20	11.666	69,28	69,57	5	5
Serang	63,09	12,35	6,69	9.886	63,57	63,97	6	6
Kota Tangerang	71,09	12,86	10,20	13.671	75,04	75,87	2	2
Kota Cilegon	65,85	13,07	9,66	12.057	70,99	71,57	3	3
Kota Serang	67,23	12,34	8,58	12.091	69,69	70,26	4	4
Kota Tangsel	72,11	13,58	11,56	14.361	78,65	79,17	1	1

Sumber: BPS Provinsi Banten tahun 2013-2014

Secara keseluruhan, sebagaimana terlihat pada tabel 7.3, tingkat keberhasilan pembangunan manusia Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baru mencapai 79,17. Kondisi ini mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2013 yang sebesar 78,65. Jika digolongkan menurut pencapaian skor, maka angka IPM Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 termasuk golongan angka IPM tinggi.

Jika dibandingkan antar kabupaten/kota se-Provinsi Banten, maka pencapaian pembangunan manusia di Kota Tangerang Selatan pada tahun baik tahun 2013 maupun tahun 2014 berada pada peringkat pertama. Bila dilihat dari unsur komponen IPM, Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2014 di Kota Tangerang Selatan adalah yang paling tinggi dibanding Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Banten yaitu sebesar 72,11, disusul Kota Tangerang sebesar 71,09 dan Kabupaten Tangerang sebesar 68,98. Ini

menunjukkan bahwa secara rata-rata umur harapan hidup penduduk di Kota Tangerang Selatan mendekati umur 72 tahun.

Sedangkan komponen kedua yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Banten tertinggi adalah Kota Tangerang Selatan sebesar 13,58 , diikuti oleh Kota Pandeglang yaitu sebesar 13,38 dan Kota Cilegon sebesar 13,07. Angka harapan lama sekolah menunjukkan bahwa anak di Kota Tangerang Selatan yang berusia 7 tahun keatas diharapkan dapat bersekolah selama 13,58 tahun. (Minimal lulus D1).

Sedangkan komponen ketiga yaitu Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Rata-rata Lama Sekolah (MYS) di Kota Tangerang Selatan adalah yang tertinggi dibanding kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Banten yaitu dengan angka indeks sebesar 11,56, disusul oleh Kota Tangerang sebesar 10,20, Kota Cilegon sebesar 9,66 dan Kota Serang sebesar 8,58. Sedangkan yang terendah ada di Kabupaten Lebak sebesar 5,84 dan Kabupaten Pandeglang sebesar 6,45. Rata-rata lama sekolah di Kota Tangerang Selatan sebesar 11,56 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Tangerang Selatan mencapai 11 tahun yaitu jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat kelas 3).

Bila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain ditingkat provinsi Banten peringkat IPM seperti yang terlihat pada tabel 7.4 maka Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 menduduki peringkat pertama dari 8 kabupaten dan kota di Indonesia, disusul oleh Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan terakhir Kabupaten Lebak. Demikian juga untuk peringkat IPM tahun 2014 masih sama urutan peringkatnya yaitu yang pertama Kota Tangerang Selatan disusul oleh Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang,

Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan terakhir Kabupaten Lebak. Sedangkan untuk provinsi Banten menduduki peringkat ke delapan dari seluruh provinsi di Indonesia tahun 2013 maupun tahun 2014.

Tabel 7.4.

Peringkat Indeks Pembangunan Manusia
dirinci menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten 2013-2014

Provinsi / Kab/Kota	Peringkat IPM	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
BANTEN	8	8
Kabupaten Pandeglang	7	7
Kabupaten Lebak	8	8
Kabupaten Tangerang	5	5
Kabupaten Serang	6	6
Kota Tangerang	2	2
Kota Cilegon	3	3
Kota Serang	4	4
Kota Tangsel	1	1

Sumber: BPS RI 2013- 2014

Bila dilihat dari komponen pembentuk IPM diantaranya yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2014 tertinggi adalah Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 72,11, diikuti oleh Kota Tangerang sebesar 71,09, Kabupaten Tangerang sebesar 68,98, Kota Serang sebesar 67,23, Kabupaten Lebak sebesar 65,88, Kota Cilegon 65,85 dan terendah Kota Pandeglang sebesar 62,91.

Angka Harapan Lama Sekolah tertinggi Kota Tangerang Selatan sebesar 13,58, selanjutnya Kabupaten Pandeglang sebesar 13,38, Kota

Cilegon sebesar 13,07 dan Kota Tangerang sebesar 12,86. Sedangkan urutan terendah yaitu Kota Serang sebesar 12,34 dan Kabupaten Serang sebesar 12,35. Bila dilihat dari Rata-rata Lama Sekolah(MYS) pencapaian tertinggi masih di Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 11,56 tahun, diikuti oleh Kota Tangerang sebesar 10,20 tahun, Kota Cilegon sebesar 9,66 tahun dan Kota Serang sebesar 8,58 tahun. Yang terendah adalah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak masing-masing sebesar 6,45 tahun dan 5,84 tahun.

Demikian juga bila dilihat dari indeks kemampuan daya beli (PPP) perkapita setahun. Nilai yang tertinggi adalah Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar Rp. 14.361.000, diikuti oleh Kota Tangerang sebesar Rp. 13.671.000, Kota Serang Rp. 12.091.000, Kota Cilegon sebesar Rp. 12.057.000, Kabupaten Tangerang sebesar 11.666.000, dan Kabupaten Serang sebesar Rp. 9.886.000 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 7.589.000. Bila dilihat secara keseluruhan bahwa IPM kabupaten dan kota di provinsi Banten ada 2 kelompok yaitu IPM Tinggi ($70 \leq 80$) dan IPM Sedang. masuk ke-golongan IPM Menengah ($60 \leq 70$). Yang termasuk dalam IPM Tinggi yaitu Kota Tangerang Selatan sebesar 79,17, Kota Tangerang sebesar 75,87, Kota Cilegon sebesar 71,57 dan Kota Serang sebesar 70,26. Wilayah ini merupakan wilayah Kota dengan sarana dan prasarana relative lebih baik dibanding dengan wilayah kabupaten lain yang ada di provinsi Banten. Sedangkan yang masuk golongan IPM sedang yaitu Kabupaten Tangerang dengan IPM sebesar 69,57, diikuti Kabupaten Serang sebesar 63,97, Kabupaten Pandeglang sebesar 62,06 dan terendah Kabupaten Lebak sebesar 61,64. Hal ini membutuhkan kerja keras dari semua pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun

masyarakat sebagai pelaksana pembangunan sehingga kesejahteraan semakin baik yang tercermin dari IPM semakin meningkat.

Penggolongan skor/nilai IPM

Nilai IPM	Keterangan
80 - 100	IPM Sangat Tinggi
$70 \leq 80$	IPM Tinggi
$60 \leq 70$	IPM Sedang
< 60	IPM Rendah

<http://tangselkota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan 2015 memuat perkembangan beberapa indikator makro yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat seperti indikator kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dsb. Publikasi ini juga memuat angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Tangerang Selatan berikut analisisnya.



Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan

Jl. Raya Paksewan Seribu - Puspatek Rec. Satu TANGERANG SELATAN - BANTEN
Telp./Faks: (021) 75791502, E-mail: bps3674@bps.go.id



9 792009 441 007